BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi makro untuk Indonesia pada tahun 2016 diarahkan sejalan dengan visi Presiden untuk pemerintahan tahun 2015-2019 yaitu **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 9-10 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,2 – 5,5 persen dan tingkat kemiskinan menjadi berkisar antara 9,0 – 10,0 persen pada tahun 2016.

Sedangakan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, sebagai penjelasan umum untuk situasi perekonomian Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Sulawesi Barat serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Barat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Kondisi perekonomian Sulawesi Barat secara menyeluruh masih menunjukkan perkembangan yang positif. Total aktivitas ekonomi Sulawesi Barat tahun 2014 yang diukur dari PDRB mencapai Rp 29,392 triliun menurut harga berlaku atau Rp 24,169 menurut harga konstan dan PDRB perkapita mencapai Rp 23,36 juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan ditandai dengan menggeliatnya sektor-sektor ekonomi. Perlambatan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2013 yang dikhawatirkan berlanjut sebagai imbas perekonomian global berganti dengan tren positif pertumbuhan di sepanjang tahun 2014. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,73%

(yoy) atau jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,02% (yoy) maupun regional Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) yang mencapai 6,09% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2014 terjadi pada seluruh lapangan usaha. Industri pengolahan menyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 35,92%, diikuti pengadaan listrik, gas sebesar 9,64%, dan jasa-jasa lainnya sebesar 8,92%. Sementara itu, struktur perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor primer, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 41,88%, diikuti perdagangan besar, eceran, dan reparasi sebesar 10,52%, dan industri pengolahan sebesar 10,41%.

A. Indikator Makro Ekonomi Fundamental

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

   Total aktivitas ekonomi Sulawesi Barat tahun 2014 yang diukur dari PDRB mencapai Rp. 29,392 triliun menurut harga berlaku atau Rp. 24,169 menurut harga konstan dan PDRB perkapita mencapai Rp. 23,36 juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan ditandai dengan menggeliatnya sektor-sektor ekonomi. Tumbuhnya perekonomian ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalan Sulawesi Barat dari Sulawesi Selatan. Sebagai pembanding, aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan mencapai sepuluh kali lipat dari Sulawesi Barat dan merupakan yang terbesar di wilayah Sulawesi.

Grafik 3.1

Perbandingan PDRB Wilayah Sulawesi Tahun 2015 (Triliun Rupiah)

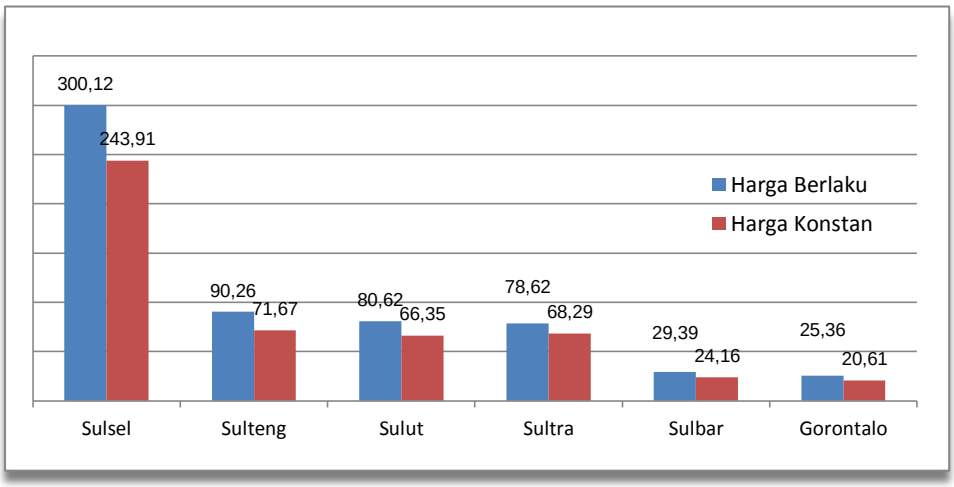

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Perlambatan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2013 yang dikhawatirkan berlanjut sebagai imbas perekonomian global berganti dengan tren positif pertumbuhan di sepanjang tahun 2014. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,73% (yoy) atau jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,02% (yoy) maupun regional Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) yang mencapai 6,09% (yoy). Sementara Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan PDRB terbesar di Sulampua hanya tumbuh 7,6% (yoy). Laju pertumbuhan ekonomi yang impresif ini dipengaruhi setidaknya oleh dua hal, yaitu: (1) tumbuhnya hampir seluruh sektor perekonomian, dan (2) ukuran ekonomi yang relatif kecil sehingga peningkatan di masing-masing sektor berpengaruh signifikan. Kondisi ini sangat kondusif untuk bertumbuhnya lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Sulawesi Barat

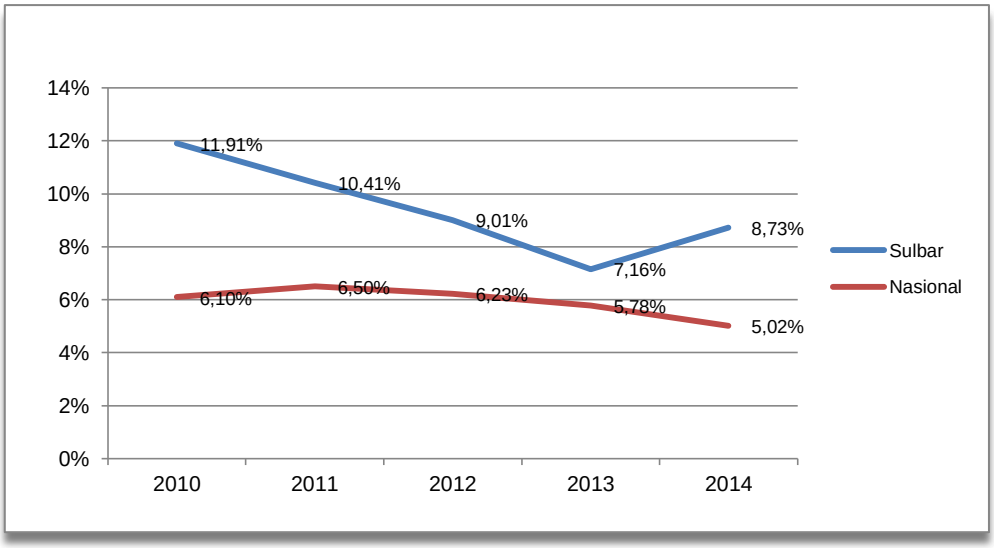

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2014 terjadi pada seluruh lapangan usaha. Industri pengolahan menyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 35,92%, diikuti pengadaan listrik, gas sebesar 9,64%, dan jasa-jasa lainnya sebesar 8,92%. Sementara itu, struktur perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor

primer, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 41,88%, diikuti perdagangan besar, eceran, dan reparasi sebesar 10,52%, dan industri pengolahan sebesar 10,41%. Apabila dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan, industri pengolahan menyumbang angka tertinggi yaitu 3,18%, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,49%, sedangkan sektor lainnya di bawah satu persen. Hal ini menunjukkan mulai terdiversifikasinya sektor pertumbuhan di Sulawesi Barat menuju ke arah industri, meskipun sektor primer masih merupakan yang terbesar. Perubahan ini harus diimbangi dengan penyiapan tenaga kerja yang mumpuni, sehingga berubahnya sektor pertumbuhan ekonomi berimbas pada peningkatan taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat.

Tabel 3.3

Sumbangan Sektor-Sektor Pertumbuhan Sulawesi Barat

Lapangan Usaha		Triw III- 2014 terhadap Triw II-2014	Triw IV-2014 terhadap Triw III-2014	Triw IV-2014 terhadap Triw IV-2013	Laju Pertumbuhan 2014	Sumber Pertumbuhan 2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,58	5,33	3,44	6,00	2,49
B	Pertambangan dan Penggalian	1,10	-0,47	20,55	8,04	0,17
C	Industri Pengolahan	2,58	6,02	56,06	35,92	3,18
D	Pengadaan Listrik , Gas	15,96	27,70	1,09	9,64	0,01
E	Pengadaan Air	3,97	0,14	10,02	6,46	0,01
F	Konstruksi	9,53	2,91	2,83	8,11	0,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,39	8,86	4,03	7,10	0,73
H	Transportasi dan Pergudangan	6,95	2,23	10,73	7,39	0,12
I	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	-0,61	2,62	4,98	6,53	0,02
J	Informasi dan Komunikasi	1,66	0,45	9,51	7,20	0,31
K	Jasa Keuangan	-1,00	7,10	6,70	3,35	0,07
L	Real Estate	16,07	20,67	3,60	4,14	0,12
M,N	Jasa Perusahaan	13,06	19,72	-2,08	3,01	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,21	13,58	16,78	4,19	0,35
P	Jasa Pendidikan	5,71	-1,22	10,71	4,02	0,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,58	5,33	15,62	6,05	0,12
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,10	-0,47	10,69	8,92	0,
	PDRB Sulawesi Barat	**4,39**	**1,23**	**10,90**	**8,73**	**8,73**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

b. Nominal PDRB

Apabila dilihat secara parsial, pertumbuhan di tahun 2014 tidak lepas dari naiknya kinerja perekonomian di triwulan IV tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2013 sebesar 10,90% (yoy). Besaran nilai PDRB pada triwulan IV tahun 2014 mencapai Rp 4.720,30 milyar atas dasar harga berlaku atau dan Rp 1.681,57 milyar atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali jasa perusahaan yang terkontraksi sebesar 2,08%. Industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 56,06%, diikuti pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 20,5% dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 16,78%.

1) PDRB Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, laju pertumbuhan ekspor, impor, dan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan di triwulan IV. Ekspor mampu tumbuh sebesar 31,95% (yoy), diikuti impor sebesar 20,95%, dan konsumsi pemerintah sebesar 16,98% (yoy). Pertumbuhan ekspor didorong oleh hasil olahan CPO menjadi minyak goreng yang dipasarkan ke luar Sulawesi Barat. Di sisi lain impor juga masih relatif tinggi mengingat sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Sulawesi Barat didatangkan dari luar daerah, sementara realisasi belanja pemerintah juga melonjak drastis.

Grafik 3.4

Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat Sisi Permintaan (yoy)

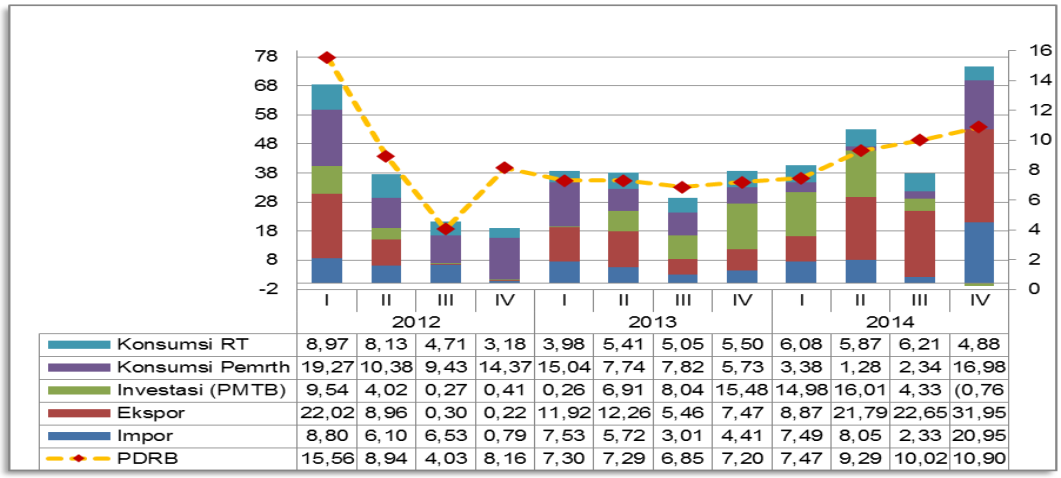

	2012 I	2012 II	2012 III	2012 IV	2013 I	2013 II	2013 III	2013 IV	2014 I	2014 II	2014 III	2014 IV
Konsumsi RT	8,97	8,13	4,71	3,18	3,98	5,41	5,05	5,50	6,08	5,87	6,21	4,88
Konsumsi Pemrth	19,27	10,38	9,43	14,37	15,04	7,74	7,82	5,73	3,38	1,28	2,34	16,98
Investasi (PMTB)	9,54	4,02	0,27	0,41	0,26	6,91	8,04	15,48	14,98	16,01	4,33	(0,76
Ekspor	22,02	8,96	0,30	0,22	11,92	12,26	5,46	7,47	8,87	21,79	22,65	31,95
Impor	8,80	6,10	6,53	0,79	7,53	5,72	3,01	4,41	7,49	8,05	2,33	20,95
PDRB	15,56	8,94	4,03	8,16	7,30	7,29	6,85	7,20	7,47	9,29	10,02	10,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

a) Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga di triwulan IV 2014 cenderung stagnan apabila dibandingkan dengan triwulan III 2014, meskipun komponen ini masih tetap dominan sebagai pembentuk PDRB (53,30%). Kenaikan harga BBM di bulan Oktober 2014 tidak terlalu berpengaruh pada kenaikan harga-harga, karena seiring penurunan harga minyak dunia pemerintah juga sigap menurunkan harga BBM di akhir tahun. Permintaan atas bahan-bahan konsumsi pada perayaan Natal juga tidak terlalu besar, mengingat umumnya non residen mengambil libur panjang sampai dengan awal tahun.

Grafik 3.5

Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (yoy)

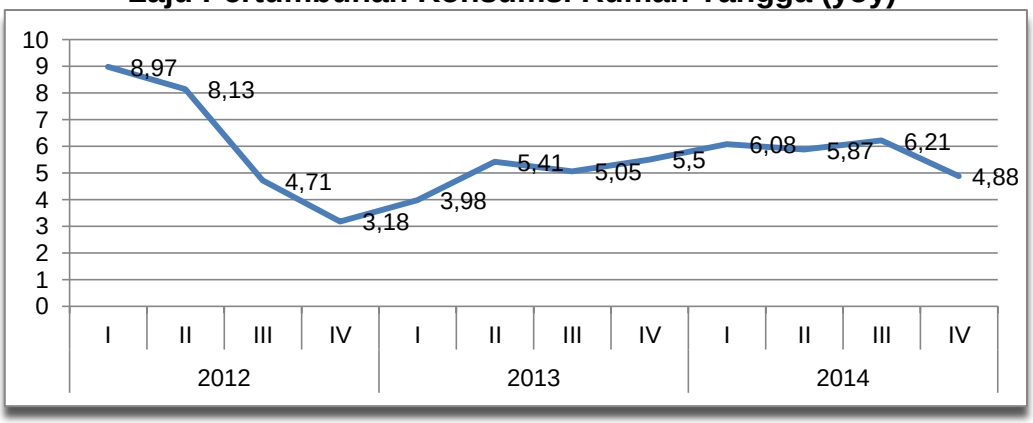

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

b) Investasi

Apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2013, kenaikan pembentukan modal tetap bruto di tahun ini cenderung melambat. Tahun lalu, pendirian pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng memiliki andil besar dalam mendorong investasi, sementara tahun ini investasi berskala besar sejenis tidak ada. Investasi di triwulan ini mengalami penurunan 0,76% jika dibandingkan dengan triwulan IV 2013, meskipun jika dibandingkan dengan triwulan III 2014 tetap menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini antara lain berasal dari investasi pemerintah dan swasta terkait infrastruktur dalam rangka MP3EI.

Grafik 3.6

Perkembangan Investasi Sulawesi Barat

Tahun 2012 - 2014

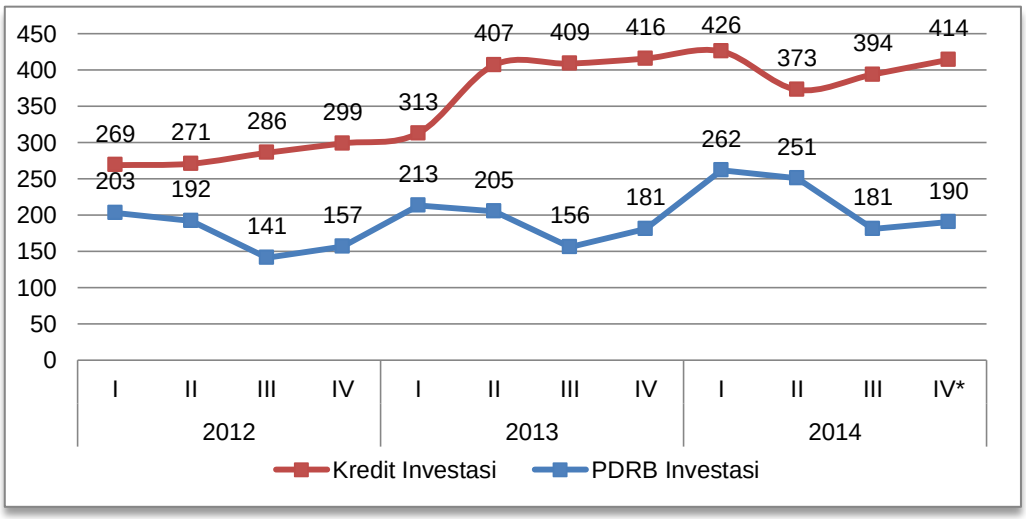

Sumber : KEKR Bank Indonesia Wil I Sulampua (Data Sementara)*

Nilai investasi yang berskala nasional di Sulawesi Barat pada tahun 2014 mencapai Rp 12,1 triliun, yang terdiri dari PMDN sebesar Rp 11,47 triliun dan PMA sebesar Rp 634,5 milyar. Jumlah investor di tahun 2014 juga mengalami peningkatan hampir 45%, yaitu dari 438 investor di tahun 2013 menjadi 635 investor di tahun 2014. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang terserap mengalami peningkatan hampir 10%, yaitu dari 19.127 orang di tahun 2013 menjadi 20.887 orang di tahun 2014.

Grafik 3.7

Perkembangan Nilai Investasi Sulawesi Barat (Milyar Rupiah)

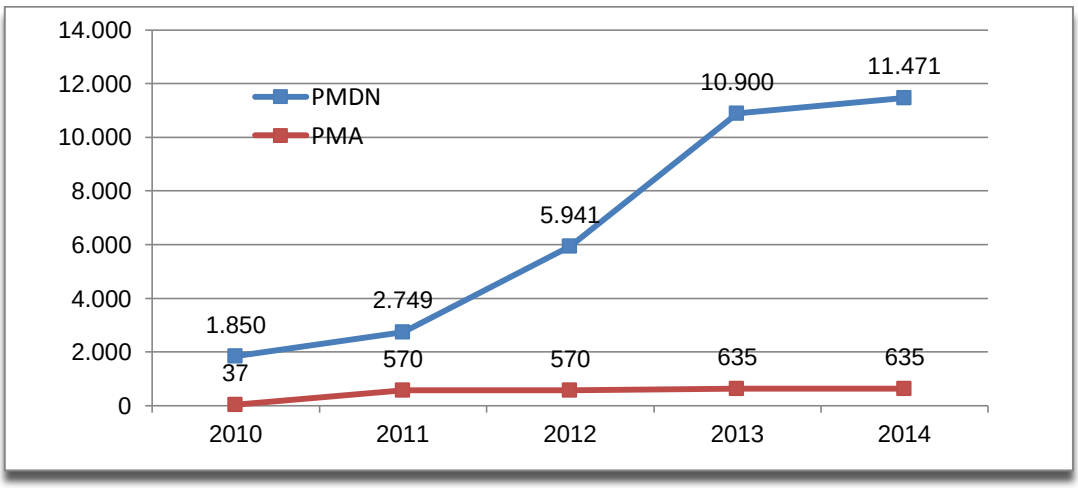

Sumber : Badan Penanaman Modal Daerah Sulawesi Barat, 2014

c) Pengeluaran Pemerintah

Grafik 3.8

Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

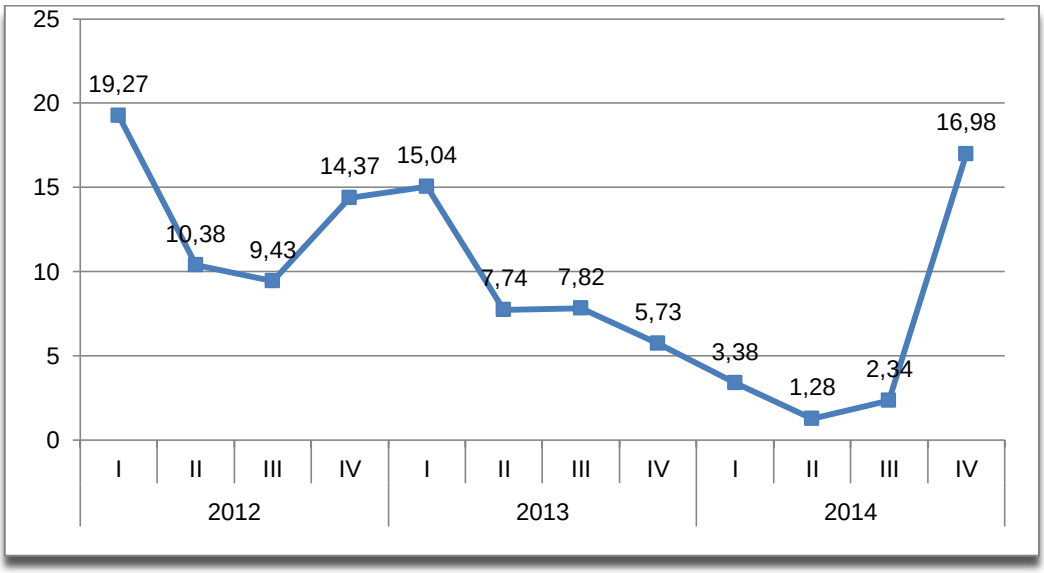

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Di triwulan IV ini, konsumsi pemerintah mencapai titik tertinggi seiring jatuh tempo pembayaran atas beban APBN dan APBD. Peningkatan realisasi belanja pemerintah di triwulan ini hampir mencapai dua kali lipat jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013, konsumsi pemerintah meningkat 16,98%.

Namun demikian, peningkatan konsumsi pemerintah di triwulan IV juga patut diwaspadai untuk membuat kebijakan *counter cyclical* untuk memperbaiki penyerapan anggaran (*expenditure smoothing*).

d) Ekspor dan Impor

Aktivitas ekspor sepanjang tahun 2014 mengalami percepatan seiring beroperasinya pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng. Hasil olahannya yang didistribusikan ke luar Sulawesi Barat berpengaruh besar pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan ini, ekspor berkontribusi hampir sepertiga dari total pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013. Sementara itu, kenaikan impor lebih dipengaruhi oleh distribusi barang kebutuhan pokok yang masih harus didatangkan dari luar Sulawesi Barat. Kenaikan harga BBM berpengaruh pada kenaikan tarif angkutan distribusi yang berpengaruh pada harga barang-barang. Datangnya hari raya Natal dan akhir tahun juga membuat juga berimbas pada meningkatnya permintaan dan distribusi barang sebagai antisipasi libur akhir tahun.

Grafik 3.9

Perbandingan Ekspor dan Impor PDRB Sulawesi Barat Dengan Tahun Dasar 2010 (Miliar Rupiah)

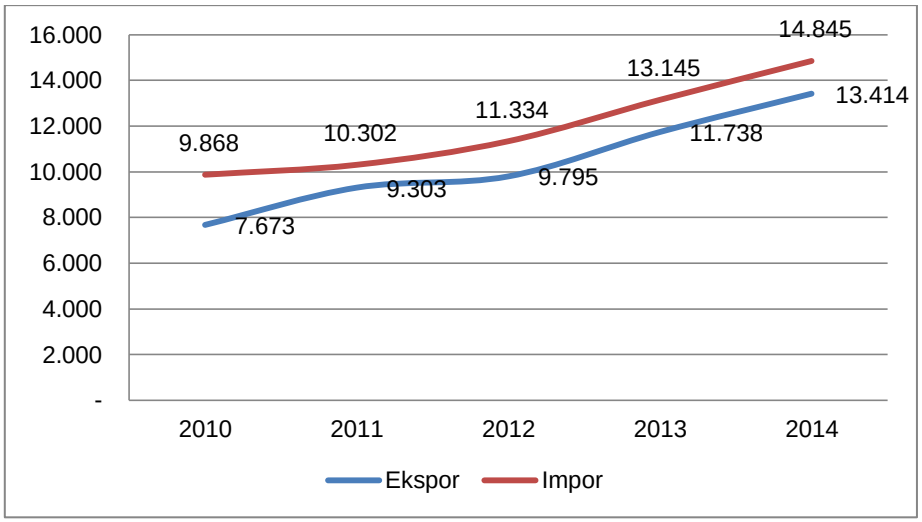

Sumber : KEKR Bank Indonesia Wil I Sulampua

2) PDRB Sisi Penawaran

Sektor pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Sulawesi Barat sepanjang triwulan IV 2014. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan ini tumbuh 1,23% bila dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Kondisi ini melambat dari triwulan III yang tumbuh 4,39%. Melambatnya pertumbuhan sektor ini didorong oleh efek musiman yaitu terkontraksinya pertumbuhan tanaman pangan. Selain melemahnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha lainnya yang tumbuh minus adalah pengadaan air, gas, dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,47% dan 1,22%.

Grafik 3.10

Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat

Sisi Penawaran (%; yoy)

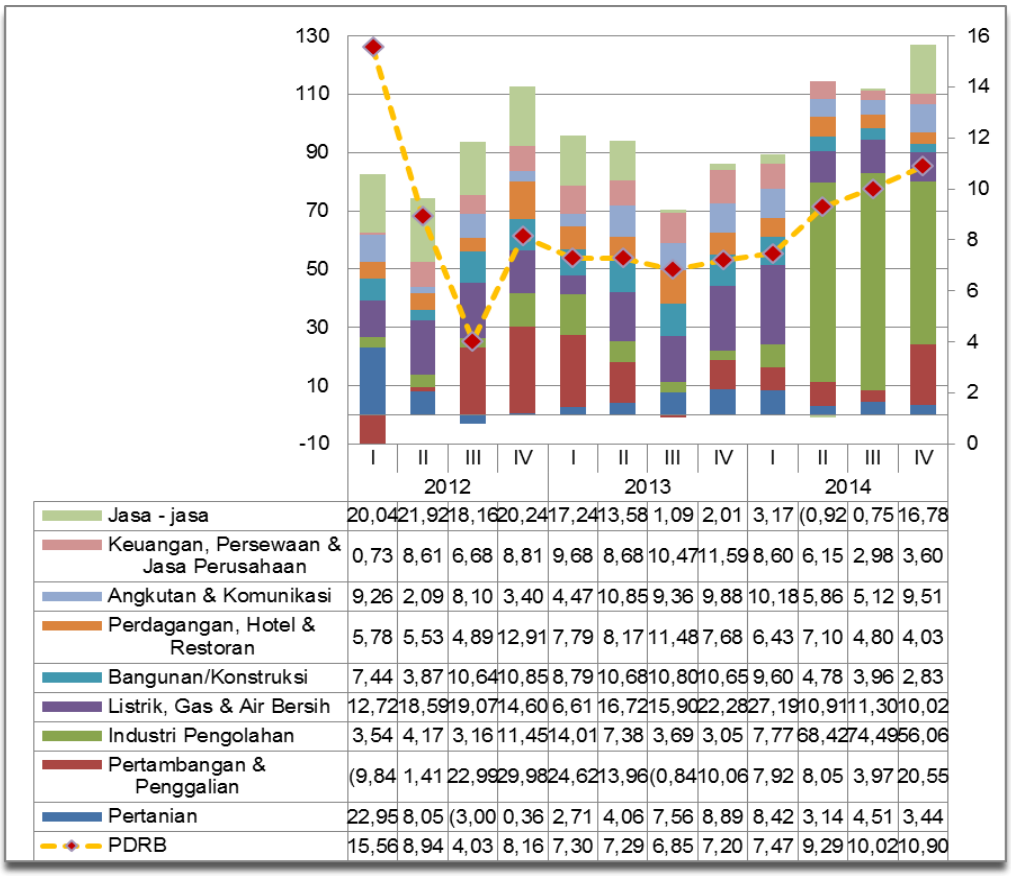

	2012 I	2012 II	2012 III	2012 IV	2013 I	2013 II	2013 III	2013 IV	2014 I	2014 II	2014 III	2014 IV
Jasa - jasa	20,04	21,92	18,16	20,24	17,24	13,58	1,09	2,01	3,17	(0,92	0,75	16,78
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,73	8,61	6,68	8,81	9,68	8,68	10,47	11,59	8,60	6,15	2,98	3,60
Angkutan & Komunikasi	9,26	2,09	8,10	3,40	4,47	10,85	9,36	9,88	10,18	5,86	5,12	9,51
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,78	5,53	4,89	12,91	7,79	8,17	11,48	7,68	6,43	7,10	4,80	4,03
Bangunan/Konstruksi	7,44	3,87	10,64	10,85	8,79	10,68	10,80	10,65	9,60	4,78	3,96	2,83
Listrik, Gas & Air Bersih	12,72	18,59	19,07	14,60	6,61	16,72	15,90	22,28	27,19	10,91	11,30	10,02
Industri Pengolahan	3,54	4,17	3,16	11,45	14,01	7,38	3,69	3,05	7,77	68,42	74,49	56,06
Pertambangan & Penggalian	(9,84	1,41	22,99	29,98	24,62	13,96	(0,84	10,06	7,92	8,05	3,97	20,55
Pertanian	22,95	8,05	(3,00	0,36	2,71	4,06	7,56	8,89	8,42	3,14	4,51	3,44
PDRB	15,56	8,94	4,03	8,16	7,30	7,29	6,85	7,20	7,47	9,29	10,02	10,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

a. Inflasi

Inflasi di Sulawesi Barat direpresentasikan dengan perubahan harga-harga komoditi di Kabupaten Mamuju sebagai pusat perekonomian. Selama beberapa tahun terakhir, inflasi bulanan di Mamuju cenderung di bawah rata-rata nasional. Pada bulan Desember 2014, inflasi di Mamuju mencapai 2,45% dan IHK 116,85 atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,46% dan IHK 119,00. Secara keseluruhan inflasi tahunan di Mamuju mencapai 7,88% di bawah rata-rata nasional sebesar 8,36%. Kondisi inflasi yang terkendali ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3.11

Laju Inflasi Tahunan Nasional dan Sulawesi Barat (yoy)

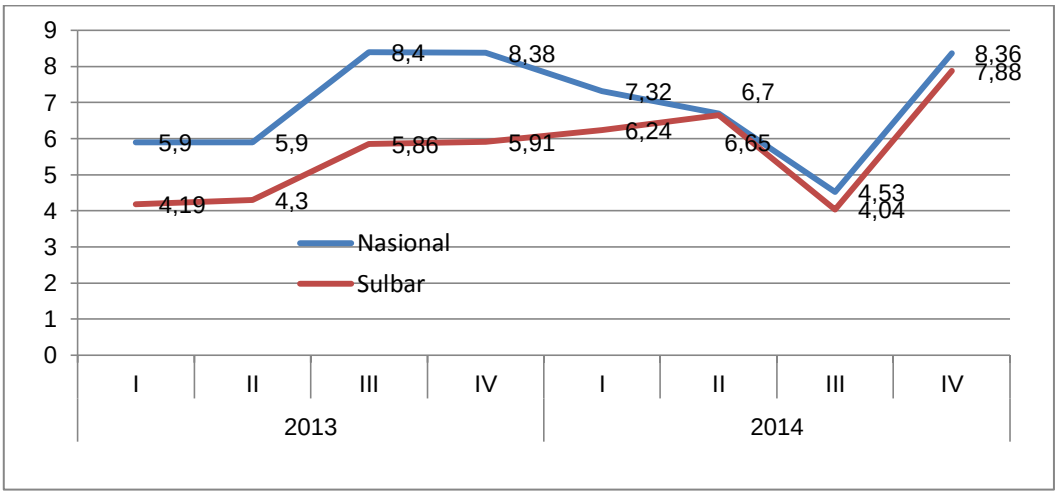

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Inflasi di Mamuju pada Desember 2014 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Tiga kelompok penyumbang inflasi terbesar yaitu: kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 4,60%; kelompok bahan makanan 3,98%; dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 2,10%. Komoditi yang dominan memberikan andil inflasi pada Desember 2014 adalah komoditi yang harus didatangkan dari luar Mamuju, antara lain bensin, cabe merah, dan angkutan antar kota. Komoditi di atas mengalami kenaikan harga seiring penyesuaian harga BBM oleh pemerintah, dan langkanya komoditi cabe

merah yang bersifat musiman. Sementara komoditi yang dominan menekan laju inflasi adalah komoditi asli Mamuju seperti wortel, pepaya, dan cakalang. Komoditi pertanian dan perikanan ini tersedia cukup banyak di pasaran seiring peningkatan produksi musiman. Di triwulan IV, naiknya nilai tukar dolar turut memicu kenaikan harga bahan bangunan seperti semen dan batu bata, serta kenaikan tarif sewa rumah dan kontrak yang mendorong inflasi di kelompok perumahan.

Grafik 3.12

Laju Inflasi Sektor Dominan Sulawesi Barat (yoy)

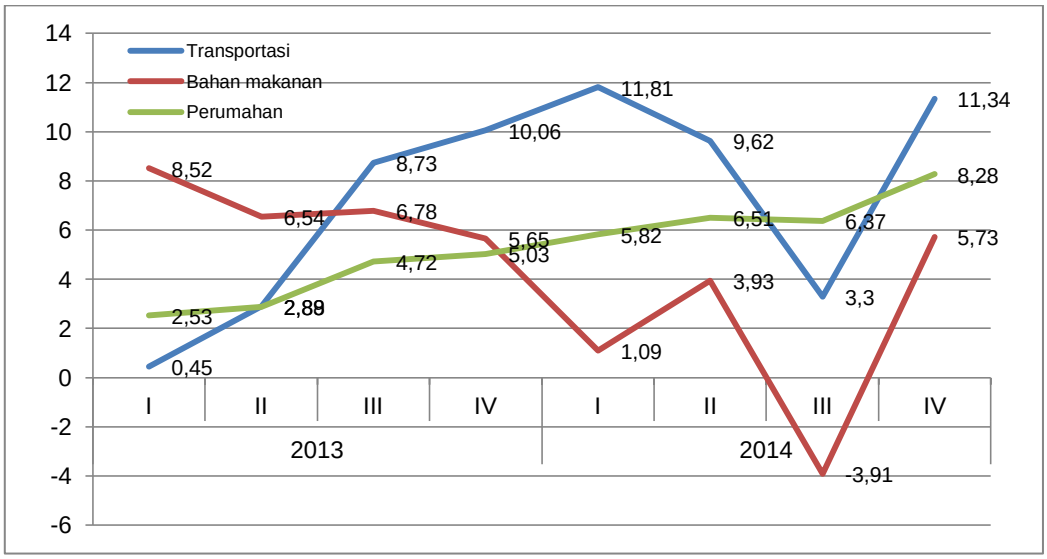

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

b. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin Sulawesi Barat pada September 2014 sebanyak 154,69 ribu jiwa atau bertambah 3,56 ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014. Namun demikian, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,22% dari 12,27% pada Maret 2014 menjadi 12,05% pada September 2014. Selama satu semester tersebut, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 3,56 ribu jiwa (0,83%). Sementara itu, di daerah perdesaan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 2,76 ribu jiwa (0,52%).

Garis Kemiskinan (GK) Sulawesi Barat sebesar Rp. 246.524,- per kapita per bulan atau meningkat 5,43% bila dibandingkan Maret 2014. Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2014 sebesar 80,0%. Terdapat 5 komoditi makanan di bulan September 2014 yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, gula pasir dan minyak kelapa. Untuk komoditi bukan makanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu biaya perumahan.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Barat sebesar 1,94 atau meningkat 0,50 poin bila dibandingkan Maret 2014, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Barat sebesar 0,52 atau meningkat 0,27 poin bila dibandingkan Maret 2014. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan, namun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin tinggi.

Persentase penduduk menurut status kemiskinan pada September 2014, yaitu: Sangat Miskin (SM) 3,97 persen; Miskin (M) 8,08 persen; Hampir Miskin (HM) 10,40 persen; dan Rentan Miskin Lainnya (RML) 23,22 persen. Persentase rumah tangga penerima raskin berdasarkan kuintail pada September 2014, antara lain: Kuintail 1 sebesar 80,15 persen; Kuintail 2 sebesar 73,68 persen; Kuintail 3 sebesar 67,67 persen; Kuintail 4 sebesar 54,57 persen dan Kuintail 5 sebesar 26,93 persen.

Tabel 3.13

Persentase Penduduk Menurut Status Kemiskinan,

September 2013 – September 2014

		Kota	Desa	Kota + Desa
Sangat Miskin (SM)	Sep-13	-	3.41	2.63
	Mar-14	2.18	2.35	2.31
	Sep-14	4.55	3.8	3.97
Miskin (M)	Sep-13	8.57	9.9	9.6
	Mar-14	6.98	10.84	9.95
	Sep-14	5.45	8.87	8.08
Hampir Miskin (HM)	Sep-13	9.4	9.01	9.1
	Mar-14	4.81	14.16	12.02
	Sep-14	6.68	11.53	10.4
Rentan Miskin Lainnya (RML)	Sep-13	17.23	27.03	24.8
	Mar-14	11.37	25.81	22.5
	Sep-14	25.42	22.55	23.22

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

c. Ketimpangan (Gini Ratio)

Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Sulawesi Barat, masih berada di bawah rata-rata nasional maupun wilayah Sulawesi. Hal ini menyiratkan bahwa hasil pembangunan di Sulawesi Barat dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Namun apabila dibandingkan dari kurun waktu 2009, maka Koefisien Gini Sulawesi Barat cenderung meningkat/memburuk dari 0,30 pada tahun 2009 menjadi 0,349 di tahun 2013. Disparitas pendapatan ini menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi Sulawesi Barat di masa mendatang.

Grafik 3.14

Perbandingan Gini Ratio Seluruh Provinsi

Se-Sulawesi dan Nasional

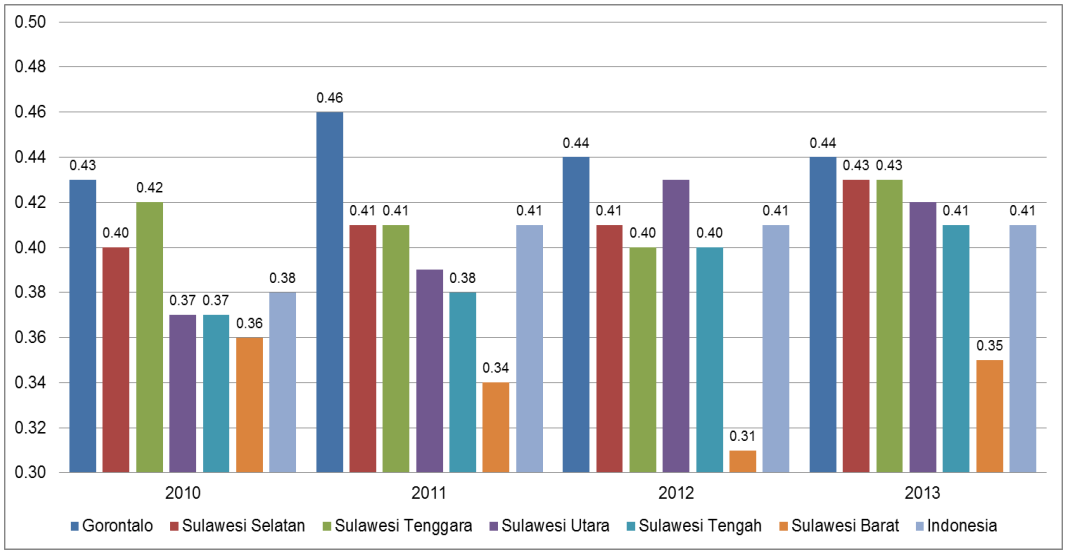

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

d. Kondisi Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Barat bulan Agustus 2014 sekitar 608,4 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 7,7 ribu orang atau naik sebesar 1,29% dibanding bulan Februari 2014. Dalam kurun waktu setahun (Agustus 2013 – Agustus 2014) jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 8,93%. Pada bulan Agustus 2014, penduduk yang bekerja sebanyak 595,8 ribu orang atau meningkat sebesar 4,7 ribu orang (0,79%) selama 6 bulan terakhir. Pertambahan penduduk yang bekerja selama setahun (Agustus 2013 – Agustus 2014) sebesar 50,4 ribu orang (9,23%). Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Agustus 2014 sebesar 2,08%, artinya dari sekitar 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 2 orang di antaranya adalah pengangguran. Angka ini turun dibandingkan dengan TPT bulan Agustus 2013 sebesar 2,35%, akan tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan TPT Februari 2014 (1,6%).

Tabel 3.15

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	Feb-13	Agu-13	Feb-14	Agu-14
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	791.320	835.797	843.984	856.255
Angkatan Kerja	573.013	558.574	600.713	608.446
* Bekerja	561.542	545.438	591.117	595.797
* Tidak Bekerja (Pengangguran)	11.471	13.136	9.596	12.649
Bukan Angkatan Kerja	218.307	277.223	266.349	247.809
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK%)	72.41%	66.83%	71,18%	71,06%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT%)	2.00%	2.35%	1,60%	2,08%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Jumlah penduduk yang bekerja dengan kriteria pekerja tidak penuh mendominasi di Sulawesi Barat yaitu sebanyak 312,6 ribu orang atau sekitar 52,46 persen, sedangkan sisanya sebanyak 283,2 ribu orang (47,54%) pekerja penuh. Lapangan usaha pertanian merupakan merupakan penyerap terbesar tenaga kerja di Sulawesi Barat. Pada bulan Agustus 2014, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini sebesar 56,84% dari jumlah penduduk yang bekerja atau sebanyak 338,6 ribu orang.

Pada bulan Agustus 2014, besaran persentase pekerja informal di Sulawesi Barat mencapai 73,18% dari total pekerja yang ada atau sebanyak 436,0 ribu orang. Sementara itu sisanya sebanyak 159,8 ribu orang (sekitar 26,82%) merupakan pekerja formal. Jika dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2013, terjadi peningkatan pekerja informal di Sulawesi Barat sebanyak 35,9 ribu atau naik sebesar 8,98%. Pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah (SLTP ke bawah), yaitu sebanyak 425,6 ribu atau sekitar 71,43%. Selanjutnya pekerja yang berpendidikan menengah (SMA dan SMK) sebanyak 108,2 ribu atau 18,15% dan yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma dan PT) sebanyak 62,1 ribu orang atau10,24%.

e. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat Desember 2014 sebesar 101,40 turun 2,45 persen dibandingkan NTP November 2014 yang sebesar 103,95. Selain itu, NTP menurut subsektor tercatat untuk subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) 92,94; Subsektor Hortikultura (NTP-H) 100.94; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R) 108,46; Subsektor Peternakan (NTP-T) 100.45; dan Subsektor Perikanan (NTN) 96,26. NTP Subsektor Perikanan terbentuk dari gabungan perikanan tangkap dan budidaya perikanan yang memiliki NTP masing-masing sebesar 95,22 dan 98,15. Hasil pemantauan harga konsumen perdesaan menunjukkan terjadinya) inflasi perdesaan di Sulawesi Barat pada Desember 2014 sebesar 2,46 persen, yang secara umum dipicu oleh meningkatnya indeks harga tujuh kelompok pengeluaran, dimana indeks harga kelompok bahan makanan meningkat sebesar 3,38 persen, indeks harga kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau meningkat sebesar 1,10 persen, indeks harga kelompok pengeluaran perumahan sebesar 0,54 persen, indeks harga kelompok pengeluaran sandang sebesar 1,52 persen, indeks harga kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 1,25 persen, kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,36 persen, dan indeks harga kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 4,91 persen.

Tabel 3.16

Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2013 - 2014

Tahun/Bulan		Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat	Tahun/Bulan		Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat
2013	Januari	104.69	2014	Januari	102.12
	Februari	104.31		Februari	102.14
	Maret	103.99		Maret	102.80
	April	104.64		April	102.98
	Mei	104.89		Mei	103.32
	Juni	105.04		Juni	103.27
	Juli	103.75		Juli	102.85
	Agustus	102.97		Agustus	102.74
	September	103.26		September	103.37
	Oktober	104.31		Oktober	104.56
	November	104.44		November	103.95
	Desember	102.45		Desember	101.40

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Inflasi di daerah perdesaan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, tertinggi di Jawa Timur 3,23 persen dan terendah di Maluku 1,64 persen. Sulawesi Barat menempati urutan ke-20 dari 33 provinsi yang mengalami inflasi. Untuk skala nasional, NTP bulan Desember 2014 sebesar 101,32, turun sebesar 1,03 persen dibandingkan bulan November 2014, dan mengalami inflasi perdesaan sebesar 2,72 persen.

f. Perkembangan Transportasi

Jumlah pesawat yang berangkat Desember 2014 sebanyak 95 penerbangan atau naik 14,46 persen jika dibandingkan November 2014 sebanyak 83 penerbangan. Sedangkan jika di bandingkan dengan Bulan Desember tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 106,52 persen, yang mencapai 46 penerbangan. Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat melalui Bandara Tampapadang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Sulawesi Barat selama Bulan Desember 2014 sebesar 3.227 orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Bulan November 2014 yang mencapai 3.667 orang, ini berarti mengalami penurunan sekitar 12,00 persen. Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan kondisi Bulan Desember tahun sebelumnya yang mencapai 2.151 orang, maka terjadi peningkatan sebesar 50,02 persen. Jumlah barang yang dibongkar melalui Bandara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Sulawesi Barat selama Bulan Desember 2014 adalah sebesar 16.563 kg, yang berarti mengalami penurunan sekitar 11,06 persen, bila dibandingkan dengan keadaan Bulan November 2014 yang tercatat sebesar 18.622 kg. Jika dibandingkan dengan kondisi Bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 7.455 kg, atau naik sekitar 122,17 persen.

Jumlah pelayaran yang melalui Sulawesi Barat selama periode Bulan Desember 2014 sebanyak 129 unit, yang berarti mengalami penurunan sekitar 37,68 persen bila dibandingkan dengan keadaan Bulan November 2014 yang mencapai 207 unit. Jika dibandingkan dengan kondisi Bulan Desember tahun sebelumnya yang mencapai 169 unit, mengalami penurunan sebesar 23,67 persen. Jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat melalui Sulawesi Barat selama Bulan Desember 2014 sekitar 1.883 orang, apabila dibandingkan kondisi pada Bulan November 2014 yang mencapai 2.315 orang, hal tersebut terjadi penurunan sekitar 18,66 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi Bulan Desember tahun

sebelumnya yang mencapai 2.294 orang, maka kondisi ini mengalami penurunan sebesar 17,92 persen.

g. Tingkat Hunian Kamar Hotel

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Sulawesi Barat periode Desember 2014 mencapai 38,32 persen. Dibanding dengan November 2014 yang sebesar 43,02 persen mengalami penurunan sekitar 4,70 poin. Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 44,76 persen, hal ini mengalami penurunan sekitar 6,44 poin. Sedang TPK Hotel Non Bintang atau akomodasi lainnya, periode Desember 2014 sebesar 19,65 persen, atau turun 3,82 poin dari keadaan bulan sebelumnya yakni November 2014 sebesar 23,47 persen. Jika dibandingkan Desember tahun sebelumnya, maka memperlihatkan penurunan sebesar 2,28 poin, atau sebesar 21,93 persen.

Rata-rata lama menginap tamu Asing pada Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang atau Akomodasi lainnya di Sulawesi Barat pada periode Desember 2014, jika dibandingkan dengan keadaan bulan November 2014 maupun Desember tahun sebelumnya tercatat 0,00 hari, atau 0,00 hari.

Rata-rata lama menginap tamu Nusantara pada Hotel Bintang di Sulawesi Barat periode Bulan Desember 2014 sebesar 1,52 hari, dibanding dengan November 2014 yang tercatat 1,32 hari, telah mengalami peningkatan sebesar 0,20 hari. Dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya sebesar 1,34 hari, atau naik 0,18 hari. Rata-rata lama menginap tamu nusantara pada Hotel Non Bintang atau Akomodasi lainnya periode Desember 2014 sebesar 1,61 hari, tidak mengalami perubahan atau sebesar 0,00 hari, jika dibandingkan November 2014 yang tercatat sebesar 1,61 hari. Jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 1,41 hari atau naik sebesar 0,20 hari.

Rata-rata Tamu per Kamar atau Guest Per Room (GPR) pada Hotel Bintang di Sulawesi Barat periode Desember 2014 sebesar 1,70 orang. Sementara November 2014 sebesar 1,89 orang, hal ini memperlihatkan penurunan 0,19 orang. Sedangkan Desember tahun sebelumnya tercatat sebesar 1,81 orang, atau turun 0,11 orang. Untuk Hotel Non Bintang atau Akomodasi lainnya pada periode bulan Desember 2014 rata-rata tamu per kamar sebesar 2,13 orang. Sementara pada bulan November 2014 sebesar 2,02 orang atau naik 0,11 orang. Sedangkan rata-rata tamu per kamar pada bulan Desember tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,90 orang, atau naik 0,23 orang.

Tabel 3.17

Perkembangan Perhotelan di Sulawesi Barat

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Jumlah Hotel	77	86	95	103	116	128	128
Jumlah Kamar	969	1,075	1,217	1,535	1,782	1,980	1,980
Jumlah Tempat Tidur	1,654	1,840	2,039	2,518	2,770	3,207	3,207
Jumlah Tamu	45,311	53,337	53,073	68,057	150,080	192,589	128,481
1.Nusantara	45,211	53,271	53,011	67,821	149,592	192,285	128,278
2.Mancanegara	100	66	62	236	488	304	203

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 * (angka sementara)*

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

(Sinergi dengan RPJMN Tahun 2010 – 2014)

NO.	INDIKATOR	RPJMN 2010-2014 (TARGET 2014)		RPJMD 2012-2016 (TARGET)			
		KONDISI (2010)	TARGET (2014)	KONDISI (2010)	KONDISI (2011)	TARGET (2014)	TARGET (2016)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 5,6	7 - 7,7	11,91	10,41	8 – 9	9 – 10
2.	Kemiskinan (%)	14,06 – 13,93	8 – 10	14,71	13,64	10,88	9,36
3.	Pengangguran (%)	4,1 – 4,5	5 – 6	2,25 – 3,25	2,82	4 – 5	3 – 4
4.	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)	28	24	15,2	11,6	10	9,93
5	Rata-Rata Lama Sekolah	7,50	8,70	7,50	7	8,70	8,8
5.	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,82	71,01	70,80	71,50	73,00	72,00
6.	Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu)	3,989.52	4,315.76	3,989.52	4,115.00	4,315.76	4,400

Sumber : Perda RPJMD Prov. Sulbar. 2012 - 2016

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2015 dan 2016

Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pembangunan daerah maka tantangan dan prsopek perekonomian sulawesi Barat, tentunya sangat dipengaruhi oleh tantangan dan prsopek pada tataran global, nasional maupun lingkup regional Sulawesi Barat sendiri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan

meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 tetap di atas nasional. Kedepan Sulawesi Barat akan mulai *concern* kepada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pangan, agar tidak hanya memproduksi bahan baku namun harus sudah mulai mengangkat value. Tahun 2016 juga memberikan tantangan dengan mulai berlakunya agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015. Tantangan utama yang dihadapi Sulawesi Barat adalah bagaimanan menciptakan produk inovatif yang berdaya saing tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur, dan teknologi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya keras mempersiapkan usaha mikro kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan industri kreatif serta terus menerus memperkenalkan kepada masyarakat hasil produknya. Sulawesi Barat merupakan bagian dari masyarakat global, untuk itu perlu mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi tantangan dalam persaingan MEA 2015.

Berbagai kondisi strategi secara internal yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan sektor unggulan sebagai daya ungkit pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Variabel	Penjelasan
Kekuatan	1. Secara geografis Prov. Sulbar dapat dikembangkan menjadi Pusat Ekonomi di Indonesia Timur 2. Sektor unggulan yang ada merupakan segmen usaha yang dijadikan wahana dan tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi terciptanya wira usaha baru 3. Unit usaha tersebut memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perkembangan pasar domestik

	khususnya produk-produk konsumsi tradisional serta kuatnya akar pada penggunaan input sumber daya alam dan daerah 4. Tidak gampang tertembus pasar domestik oleh produk-produk sejenis dari impor karena tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan sederhana dan tidak memerlukan keterampilan yang tinggi 5. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan sektor unggulan didaerah telah tersedia
Kelemahan	1. Produk – produk sektor unggulan kebanyakan masih belum tembus pasar ekspor dunia 2. SDM yang terlibat dalam dunia usaha sektor unggulan belum banyak yang berkualifikasi andal dan profesional, pengusaha – pengusaha umumnya masih belum mampu untuk memenuhi perminataan pasar yang menuntut kestabilan mutu, jumlah pesanan yang besar, delivery cepat dan tepat waktu
Peluang	1. Ekspansi fiskal pemerintah pusat dan daerah berdampak positif terhadap sektor usaha 2. Letak Sulawesi Barat yang berada ditengah-tengah pulah Sulawesi 3. Sulawesi Barat dapat dijadikan alternative lain untuk jalur perekonomian dan perdagangan di Indonesia Timur

Tantangan	1. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga 2. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi 3. Kelangkaan energi pada beberapa Tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energy alternative 4. Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lok

3.1.3 Keunggulan dan Potensi Ekonomi Regional

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Barat. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan. Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Barat dirasa masih sangat kurang dan perlu perhatian yang lebih serius. Data pada tahun 2013, jumlah sarana kesehatan di Sulawesi Barat sebanyak 6 (enam) rumah sakit daerah.

Grafik 3.18

Fasilitas Kesehatan Per-Kabupaten di Sulawesi Barat 2013

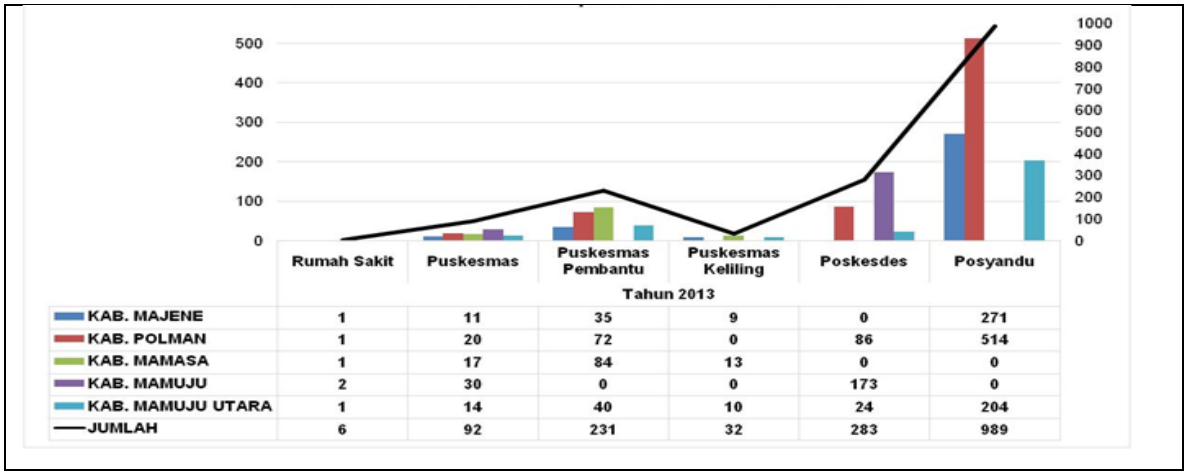

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Salah satu indikator penting dalam rangka mengukur perkembangan suatu daerah adalah indikator sektor kesehatan. Semakin banyak fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia maka akses terhadap fasilitas kesehatan akan semakin mudah. Sementara keberadaan rumah sakit yang hanya berada di perkotaan membuat masyarakat sulit untuk mengakses rumah sakit terutama yang berada di pelosok. Olehnya itu, pemerintah daerah mendirikan puskesmas dan pustu yang dapat menjangkau ke wilayah pedesaan. Sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengakses sarana kesehatan. Bila dilihat dari sebaran fasilitas kesehatan pada setiap desa, ternyata hanya 71 desa yang terdapat Puskesmas/Pustu dan Poskesdes/Polindes di desa tersebut, sedangkan yang tidak ada fasilitas kesehatan Puskesmas/Pustu dan Poskesdes/Polindes juga sekitar 71 desa.

Perkembangan Tenaga Kesehatan di Sulawesi Barat dari tahun 2007 s/d 2013 berfluktuaktif. Hal ini disebabkan pegawai tersebut mutasi ataupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan Tenaga Kesehatan di Sulawesi Barat secara umum meningkat.

Grafik 3.19

Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Sulawesi Barat

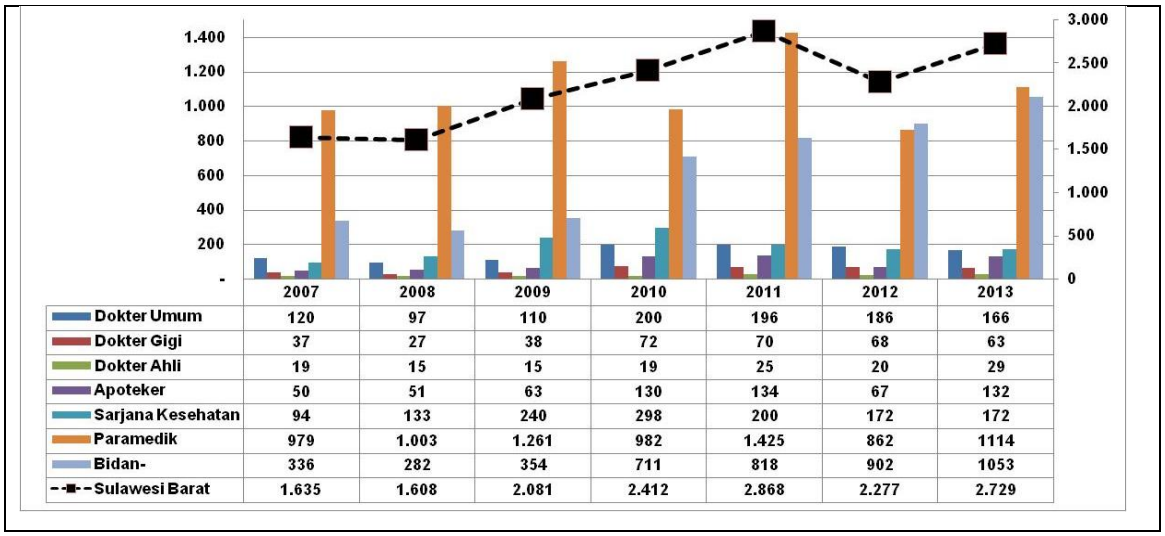

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dokter Umum	120	97	110	200	196	186	166
Dokter Gigi	37	27	38	72	70	68	63
Dokter Ahli	19	15	15	19	25	20	29
Apoteker	50	51	63	130	134	67	132
Sarjana Kesehatan	94	133	240	298	200	172	172
Paramedik	979	1.003	1.261	982	1.425	862	1114
Bidan-	336	282	354	711	818	902	1053
Sulawesi Barat	1.635	1.608	2.081	2.412	2.868	2.277	2.729

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

b. Pendidikan

Partisipasi masyarakat Sulawesi Barat terhadap pendidikan masih cukup rendah untuk tingkat SMU. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah pada tahun 2013, Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMU adalah sebesar 28,27 persen ini diartikan bahwa masih ada sekitar 71 persen penduduk usia sekolah SMU yang tidak mengenyam pendidikan, begitu juga Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMP sebesar 83,72 persen dan tingkat SD 95,03 persen. Untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan digunakan pengukuran menggunakan Angka Putus Sekolah dimana semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. angka putus sekolah di Sulawesi Barat masih sangat tinggi pada jenjang sekolah dasar (SD) bahkan menjadi yang tertinggi di Indonesia, berdasarkan data BPS 2011 terdapat 5 provinsi dengan APS tinggi untuk jenjang SD yaitu provinsi Sulawesi Barat (2,37%), Kepulauan Bangka Belitung (1,88 %) dan Papua Barat (1,56%), Papua (1,36%) serta Sulawesi Tenggara (1,32%).) dimana angka putus sekolah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan.

Grafik 3.20

Perbandingan Murid/Guru SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA dan SMK Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

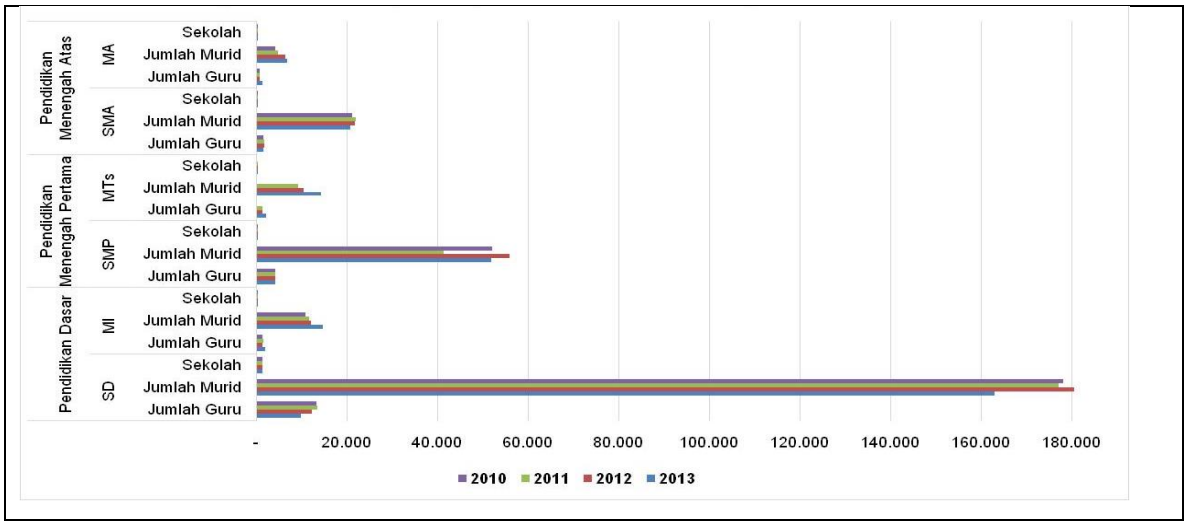

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Grafik 3.21

Angka partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat

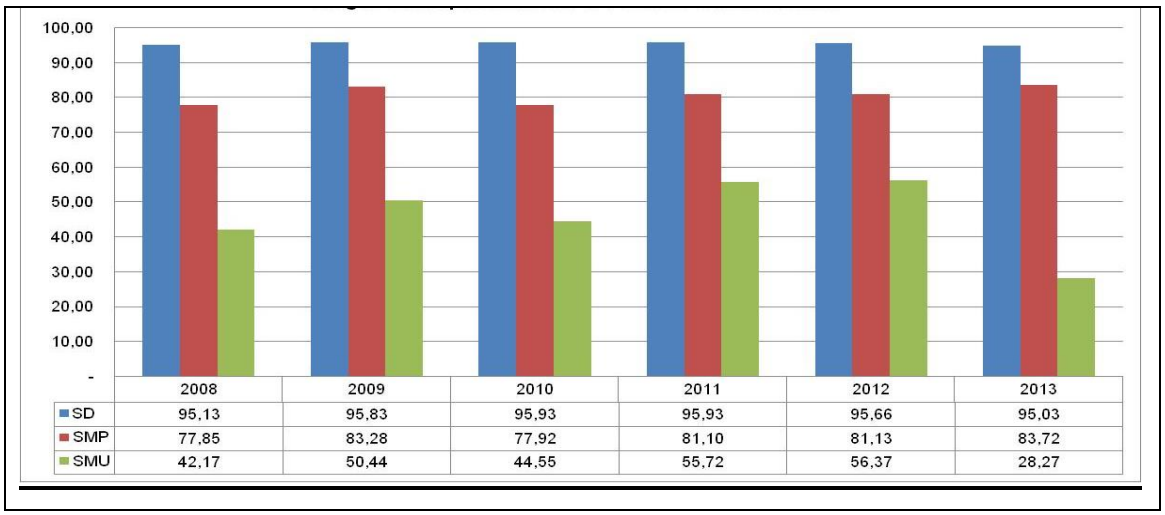

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SD	95,13	95,83	95,93	95,93	95,66	95,03
SMP	77,85	83,28	77,92	81,10	81,13	83,72
SMU	42,17	50,44	44,55	55,72	56,37	28,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Namun begitu terdapat pula prestasi bidang pendidikan yang ditorehkan oleh Kabupaten Polewali Mandar pada 2014 yang oleh UNICEF diberikan kepercayaan sebagai pilot project penerapan Sekolah Satu Atap (SATAP) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pemilihan ini dilakukan atas dasar rekam jejak dan dukungan pemerintah serta masyarakat Kabupaten Polman terhadap dunia pendidikan dinilai bagus dan sistem Informasi Pendidikan berbasis masyarakat juga telah teruji.

Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa hampir semua desa/kelurahan sudah terjangkau oleh sarana pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP). Hanya 3,24 persen (21 desa/kelurahan) yang tidak ada SD/MI, sedangkan SMP/MTs sebanyak 46,30 persen (300 desa/kelurahan). Sarana pendidikan menengah atas juga telah tersedia di sebagian wilayah kecamatan di Sulawesi Barat. Sebanyak 69 kecamatan yang tercatat dalam Podes 2014 terdapat 68 kecamatan yang ada SMU/SMK/MA.

Bila dilihat dari persebaran fasilitas pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP) pada setiap desa, ternyata hanya 341 desa yang terdapat SD/MI dan SMP/MTs di desa tersebut, sedangkan yang tidak ada fasilitas pendidikan SD/MI dan SMP/MTs hanya ada sekitar 14 desa.

Grafik 3.22

Murid/Guru SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA dan SMK Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

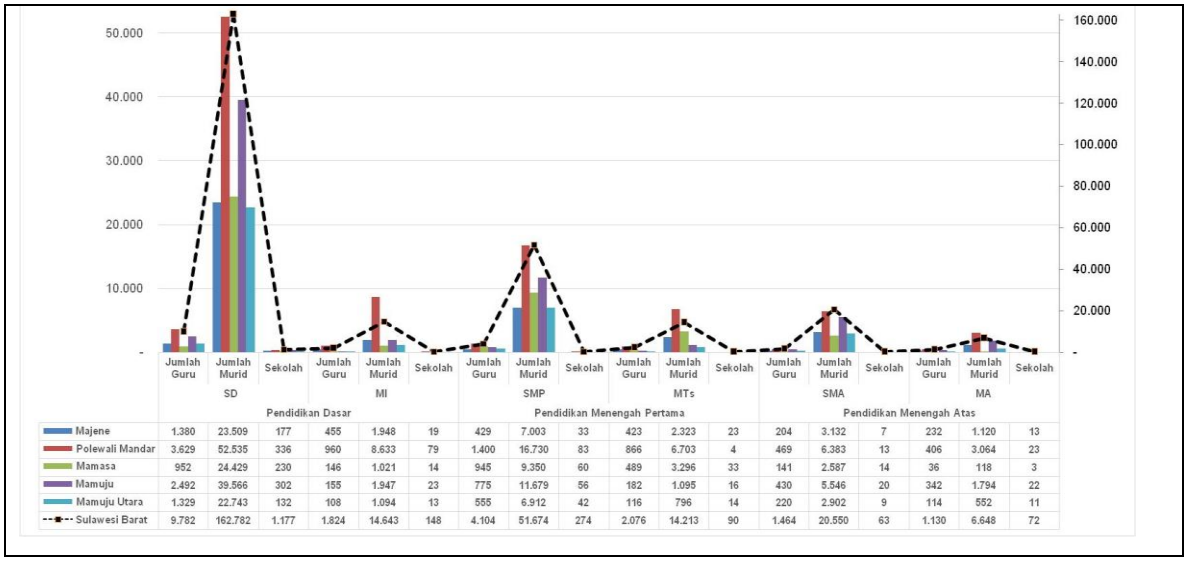

	Pendidikan Dasar						Pendidikan Menengah Pertama						Pendidikan Menengah Atas					
	SD			MI			SMP			MTs			SMA			MA		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Sekolah
Majene	1.380	23.509	177	455	1.948	19	429	7.003	33	423	2.323	23	204	3.132	7	232	1.120	13
Polewali Mandar	3.629	52.535	336	960	8.633	79	1.400	16.730	83	866	6.703	4	469	6.383	13	406	3.064	23
Mamasa	952	24.429	230	146	1.021	14	945	9.350	60	489	3.296	33	141	2.587	14	36	118	3
Mamuju	2.492	39.566	302	155	1.947	23	775	11.679	56	182	1.095	16	430	5.546	20	342	1.794	22
Mamuju Utara	1.329	22.743	132	108	1.094	13	555	6.912	42	116	796	14	220	2.902	9	114	552	11
Sulawesi Barat	9.782	162.782	1.177	1.824	14.643	148	4.104	51.674	274	2.076	14.213	90	1.464	20.550	63	1.130	6.648	72

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Untuk jenjang pendidikan tinggi di Sulawesi Barat terdapat 13 perguruan tinggi negeri dan swasta dimana lebih didominasi oleh lembaga pendidikan khusus/spesialisasi dengan porsi terbanyak adalah perguruan tinggi spesialisasi kesehatan sebanyak 6 lembaga, ilmu ekonomi ada 2 (dua), ilmu sospol 2 lembaga, ilmu ekonomi ada 1 lembaga dan ilmu pertanian 1 lembaga serta terdapat 1 (satu) perguruan tinggi negeri umum yaitu Universitas Sulawesi Barat.

Tabel 3.23

Perguruan Tinggi di Sulawesi Barat

No.	Nama	Fakultas/Jurusan
1	Universitas Sulawesi Barat	1. Pertanian 2. Kesehatan 3. Hukum 4. Teknik 5. Ekonomi 6. MIPA 7. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8. Peternakan dan Perikanan 9. KIP
2	Poltekkes Kemenkes Mamuju	1. Gizi 2. Kebidanan 3. Keperawatan 4. Kesehatan Lingkungan
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majene	1. Keperawatan D3 2. Kebidanan D3 3. Kesehatan Masyarakat S1
4	STIE Yapman Majene	1. Manajemen S1
5	STIKES Marendeng Majene	1. Kebidanan D3 2. Ilmu Keperawatan S1
6	Akademi Keperawatan Fatima Mamuju	1. Keperawatan D3
7	AMIK Tomakaka Mamuju	1. Teknik Komputer D3 2. Manajemen Informatika D3
8	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Tanratupattanabali	1. Agribisnis S1 2. Agrobisnis Perikanan S1
9	STIE Muhammadiyah Mamuju	1. Ekonomi Pembangunan S1 2. Manajemen S1
10	STIKES Andini Persada	1. Kebidanan D3 2. Farmasi D3 3. Ilmu Keperawatan S1
11	STISIP Tanratupattanabali	1. Ilmu Administrasi Negara S1 2. Ilmu Pemerintahan S1
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	1. Kebidanan D3 2. Ilmu Keperawatan S1
13	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Generasi	1. Ilmu Administrasi Negara S1 2. Ilmu Pemerintahan S1

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

c. Pertanian

Pertanian menyumbang pertumbuhan tertinggi dalam kegiatan ekonomi di Sulawesi Barat. Tujuan akhir pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sebagai daerah berkembang dengan proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sangat dominan, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai menjadi program yang sangat-sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat

ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.

Grafik 3.24

Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat

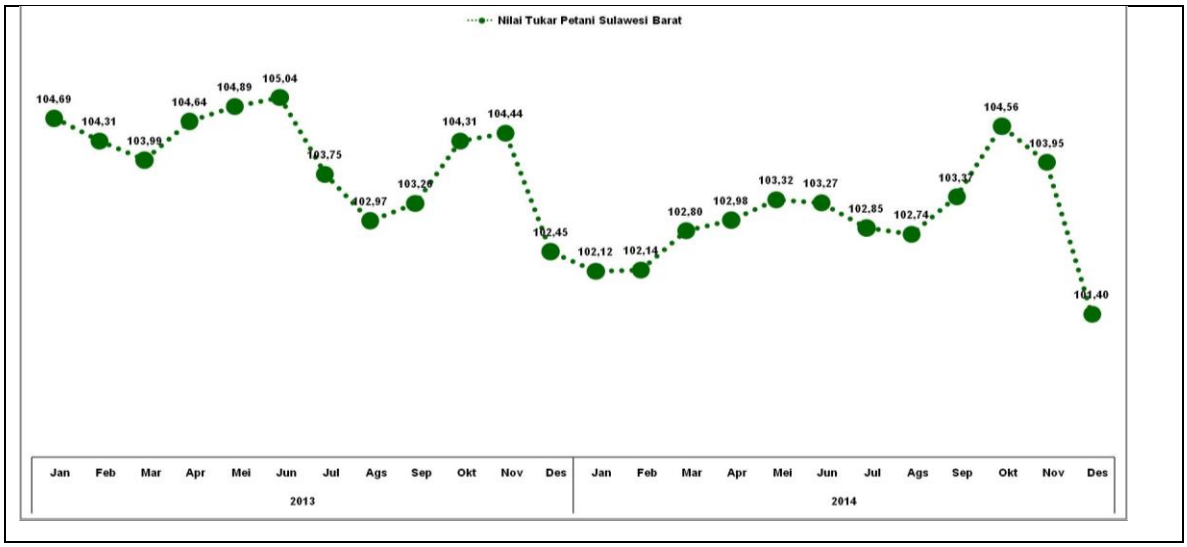

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Pelaku usaha pertanian sampai dengan tahun 2013 masih didominasi oleh pelaku rumah tangga sebesar 185.847, dimana rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 11,22 persen dari 167,098 menjadi 185,847 sedangkan perusahaan pertanian berbadan hukum mengalami pertumbuhan minus 22,22 persen dimana pada tahun 2003 terdapat 18 perusahaan dan turun menjadi 14 perusahaan di 2013. Dari keseluruhan pelaku usaha (rumah Tangga) yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 145.205 atau 78 persenya berusaha di sektor perkebunan.

Di sepanjang tahun 2014 Kenaikan NTP tertinggi dicapai pada bulan Oktober dimana tumbuh sebesar 104,56 persen ini mengindikasikan masih ada 4,56 persen penghasilan petani yang bisa disaving, sedangkan nilai terendah dicapai pada bulan Desember 2014 di mana turun dari periode sebelumnya menjadi 101,40 persen, meskipun begitu secara umum di perode tahun 2014 Nilai Tukar Petani provinsi Sulawesi Barat berada di atas 100 persen dengan fluktuasi di tiap bulannya, hal ini menggambarkan bahwa Pendapatan petani meningkat dan lebih besar

dari pengeluarannya (pengeluaran petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, penambahan barang modal dan biaya produksi).

Dalam 2 (dua) tahun terakhir NTP provinsi Sulawesi Barat posisinya berada diatas 100 persen, hal yang menarik untuk dicermati adalah ketika siklus memasuki periode Juni sampai dengan Agustus ada kencederungan NTP selalu mengalami penurunan kemudian naik lagi pada September sampai Oktober untuk kemudian mengalami penurunan yang agak tajam di bulan Desember.

Tabel 3.25

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Sub Sektor dan Pelaku Usaha

Tahun 2003 dan 2013

No	Sektor / Subsektor	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RT)				Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (Perusahaan)				Usaha Pertanian Lainnya
		2003	2013	Pertumbuhan		2003	2013	Pertumbuhan		
				Absolut	%			Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sektor Pertanian		167.098	185.847	18.749	11,22	18	14	-4	-22.22	23
Subsektor										
1	Tanaman Pangan	71.168	96.514	25.346	35,61	-	-			9
	a.Padi	52.66	68.189	15.529	29,49	-	-			5
	b.Palawija	32.77	43.414	10.644	32,48	-	-			4
2	Hortikultura	68.337	74.765	6.428	9,41	1	-	-1	-100,00	8
3	Perkebunan	135.414	145.205	9.791	7,23	15	11	-4	-26,67	6
4	Peternakan	75.165	90.413	15.248	20,29	-	-			5
5	Perikanan	17.916	19.512	1.596	8,91	2	-	-2	-100,00	3
	a.Budidaya Ikan	5.904	7.358	1.454	24,63	2	-			3
	b.Penangkapan Ikan	12.869	12.766	-103	-0,8	-	-			-
6	Kehutanan	18.657	23.638	4.981	26,7	-	3			2
	a.Budidaya Tanaman Kehutanan		20.733				3			
	b.Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar		16							
	c.Pemungutan Hasil Hutan		3.624							
	d.Penangkapan Satwa Liar		600							

Sumber : Sensus Pertanian Sulawesi Barat 2013

d. Transportasi

1. Sarana dan Prasarana Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan.

Jaringan Jalan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi peningkatan panjang jalan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Jalan Kabupaten mendominasi jaringan jalan di Sulawesi Barat, tetapi kondisi jalan sebagian besar Rusak dan Rusak Berat. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi umumnya dalam kondisi Sedang dan Baik. Pada tahun 2014 total panjang jalan di propinisi Sulawesi Barat pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 mencapai *7.378* kilometer (Data Sementara).

Grafik 3.26

Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Sulawesi Barat (Km)

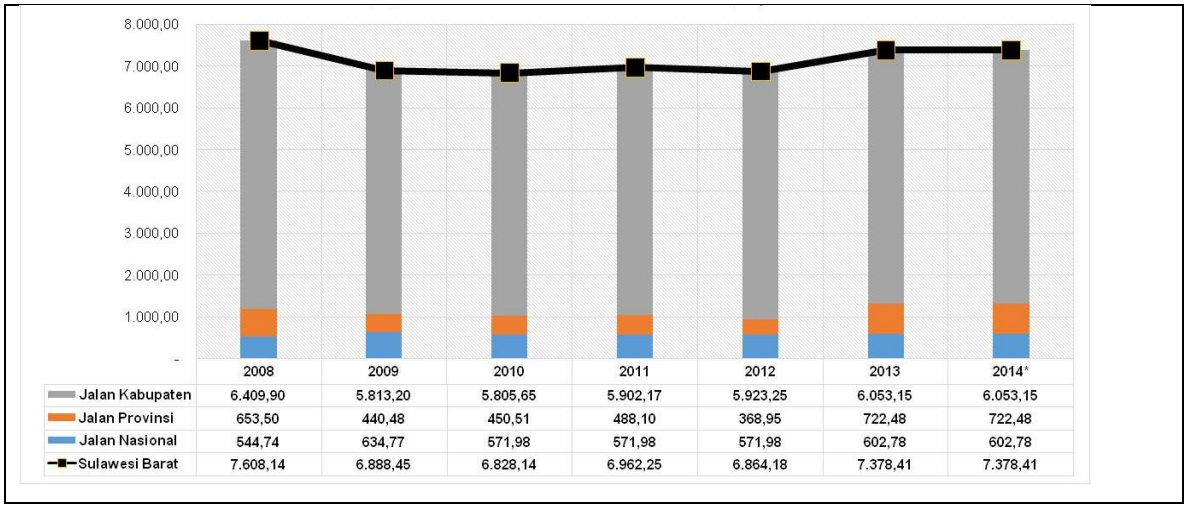

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Jalan Kabupaten	6.409,90	5.813,20	5.805,65	5.902,17	5.923,25	6.053,15	6.053,15
Jalan Provinsi	653,50	440,48	450,51	488,10	368,95	722,48	722,48
Jalan Nasional	544,74	634,77	571,98	571,98	571,98	602,78	602,78
Sulawesi Barat	7.608,14	6.888,45	6.828,14	6.962,25	6.864,18	7.378,41	7.378,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 622 desa/kelurahan (95,99%) menggunakan sarana transportasi darat dan diantaranya ada sebanyak 468 desa/kelurahan (72,22%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Angka-angka tesebut menunjukkan masih terdapat 180 desa/kelurahan (27,78%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca.

Bila dilihat dari persebaran keberadaan infrastruktur jalan pada setiap desa, ternyata 145 desa yang memiliki permukaan jalan aspal dan penerangan jalan utama di desa tersebut, sedangkan yang tidak memiliki permukaan jalan aspal dan penerangan jalan utama ada sekitar 297 desa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

2. Angkutan Darat dan Penyeberangan Laut

Untuk prasarana transportasi jalan, Jumlah terminal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 adalah sebanyak 7 lokasi dengan rincian untuk terminal Tipe A sebanyak 2 lokasi, terminal Tipe B sebanyak 1 lokasi, terminal Tipe C sebanyak 4 lokasi. Unit penimbangan (UPPKB) di Provinsi Sulawesi Barat hanya terletak 1 lokasi dimana, yaitu: JT Paku. Sedangkan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor terletak di 7 lokasi dengan jumlah peralatan pengujian jenis Mekanik sebanyak 4 buah serta jumlah peralatan Non Mekanik sebanyak 2 buah dan terdapat 12 orang penguji.

Untuk sarana transportasi jalan Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Barat belum diketahui secara jelas karena datanya masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan perkembangan jumlah sarana angkutan umum Bus AKAP dan PO tidak mengalami perubahan pada tahun 2014 yaitu 5 unit untuk Bus AKAP yang dinaungi 1 perusahaan otobus, dan untuk sarana AKDP terdapat 805 unit kendaraan.

Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, untuk Lintas Penyeberangan Provinsi Sulawesi Barat terdapat 1 lintasan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri 49 Tahun 1994, yaitu lintas penyeberangan Kariangau – Mamuju yang merupakan lintasan komersil antar provinsi, dengan jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi pada tahun 2014 sebanyak 2 kapal.

Tabel 3.27

Produksi Angkutan Penyeberangan

Lintas Balikpapan - Mamuju

No	Jenis Angkut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penumpang	75.505	22.786	72.363	68.776	45.762	29.277
2	R4	3.400	2.511	4.356	3.280	1.947	499
3	R2	1.977	1.358	2.501	5.669	1.938	1.239
4	Barang	10.557	0	0	0	0	806

Sumber : Direktorat LLASDP – Ditjen Hubdat, 2014

3. Angkutan Udara

Sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2014, angkutan udara mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukan oleh peningkatan penggunaan transportasi udara dari tahun ke tahun. Harga tiket transportasi udara yang terjangkau dan kompetitif semakin banyak dilirik oleh masyarakat Sulawesi Barat. Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat melalui Bandara Tampapadang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Sulawesi Barat selama Tahun 2014 sebesar 28.644 orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Tahun 2013 yang hanya 25.043 orang, ini berarti mengalami kenaikan sekitar 14,38 persen, sedangkan kedatangan mengalami kenaikan sekitar 16,28 persen. Peningkatan jumlah penumpang juga diikuti peningkatan jumlah barang bawaan maupun cargo melalui udara.

Grafik 3.28

Lalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri Sulawesi Barat 2014

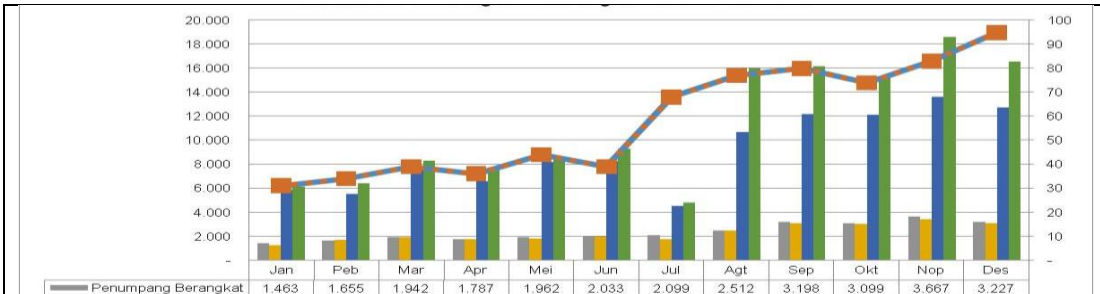

	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
Penumpang Berangkat	1.463	1.655	1.942	1.787	1.962	2.033	2.099	2.512	3.198	3.099	3.667	3.227
Penumpang Datang	1.271	1.706	1.915	1.746	1.827	2.018	1.777	2.515	3.096	3.057	3.421	3.104
Barang Muat	5.850	5.542	7.464	6.585	8.199	8.242	4.518	10.678	12.195	12.140	13.621	12.757
Barang Bongkar	6.160	6.423	8.303	7.751	8.549	9.289	4.831	15.987	16.179	15.360	18.622	16.563
Pesawat Berangkat	31	34	39	36	44	39	68	77	80	74	83	95
Pesawat Datang	31	34	39	36	44	39	68	77	80	74	83	95

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

4. Angkutan Laut

Moda transportasi angkutan laut dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Jumlah penumpang yang berangkat (keluar) mengalami penurunan dititik terendah pada tahun 2012 di angka 28.380 dan setelahnya selalu mengalami peningkatan jumlah orang yang berangkat**,** sedang untuk penumpang kapal laut yang datang ke provinsi Sulawesi Barat menunjukkan kecenderungan naik turun. Kenaikan jumlah penumpang pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 untuk keberangkatan (keluar) adalah 6,22 persen dan

kedatangan (masuk) adalah 25,8 persen hal ini menunjukkan bahwa moda transportasi laut masih menjadi pilihan favorit masyarakat yang karena biayanya yang relatif lebih murah.

Di lain pihak kenaikan jumlah penumpang ini tidak diikuti oleh kenaikan frekuensi pelayaran, karena sejak tahun 2012 selalu mengalami pengurangan/penurunan frekuensi pelayaran dari dan ke Sulawesi Barat hal ini diindikasikan akibat dari perubahan pola konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas yang beralih ke moda transportasi udara untuk kegiatan antar pulau.

Grafik 3.29

Banyaknya Penumpang Angkutan Laut dan Kunjungan Kapal di Provinsi Sulawesi Barat 2014

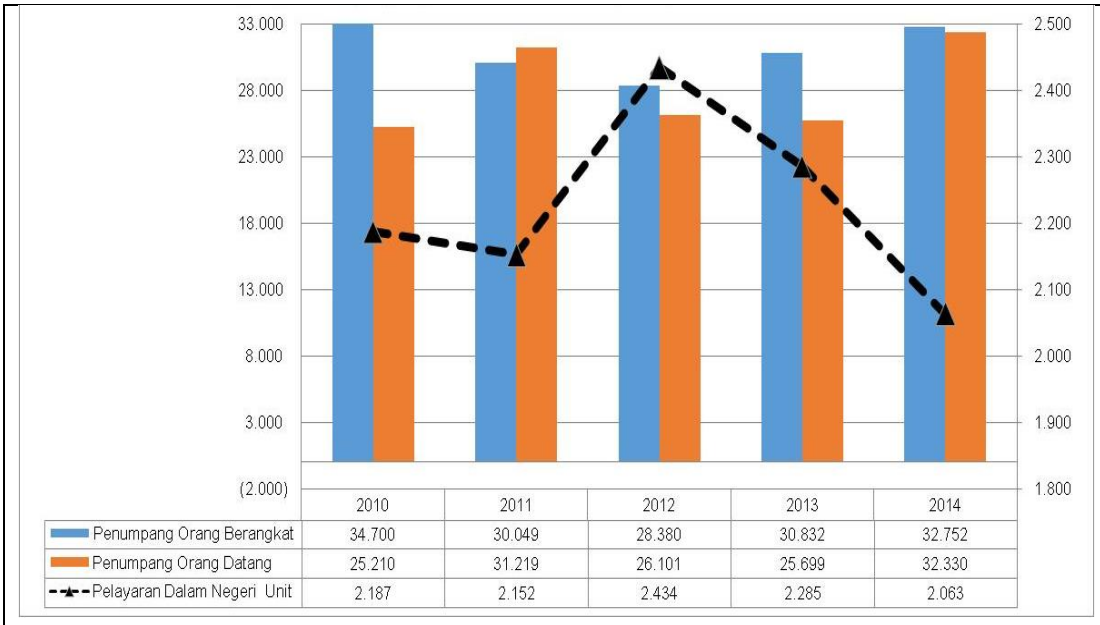

	2010	2011	2012	2013	2014
Penumpang Orang Berangkat	34.700	30.049	28.380	30.832	32.752
Penumpang Orang Datang	25.210	31.219	26.101	25.699	32.330
Pelayaran Dalam Negeri Unit	2.187	2.152	2.434	2.285	2.063

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

5. Konstruksi

Perusahaan Konstruksi di Sulawesi Barat masih didominasi oleh perusahaan berskala kecil. Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor konstruksi karena masih dalam proses pengembangan wilayah. Jumlah perusahaan konstruksi yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 1.185 perusahaan yang terdiri dari 1.141 skala kecil, 38 skala menengah, 6 skala besar. Jumlah terebut memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 1.257 perusahaan. Penurunan tersebut disebabkan oleh makin

berkurangnya perusahaan dengan skala kecil yang turut serta dalam penyediaan jasa konstruksi. Dari seluruh perusahaan yang ada 96,02% berbentuk CV, dan 3,71% badan hukum PT serta hanya 0,08 persen yang berbentuk firma, koperasi atau lainnya.

Grafik 3.30

Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum di Sulawesi Barat Tahun 2011 - 2013

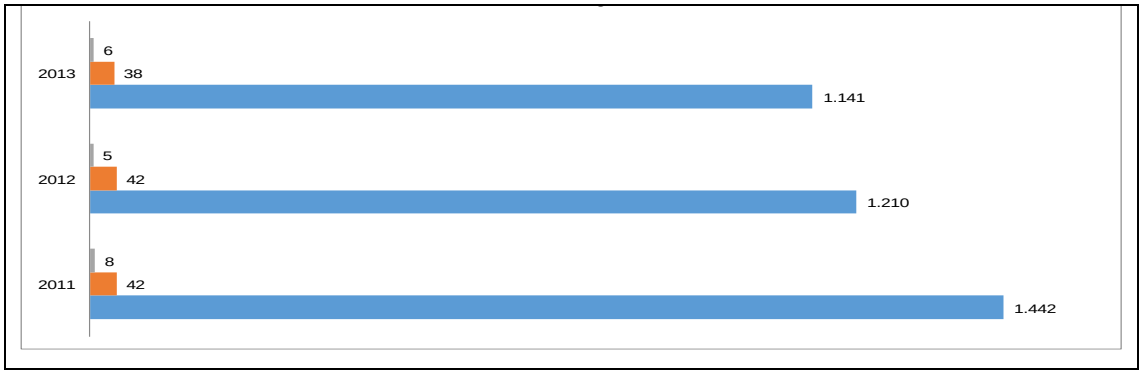

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Tenaga Ahli kontruksi di Sulawesi Barat didominasi tenaga bersertifikat usia Muda. Penyebaran tenaga ahli tersebut belum merata di seluruh kabupaten. Hal tersebut dipengaruhi oleh minimnya pekerjaan konstruksi di Kab. Mamasa dan Kab. Mateng. Usaha jasa tenaga ahli tersebut juga masih didominasi usaha kecil.

Grafik 3.31

Statistik Sertifikat Tenaga Ahli Daftar Menurut Kabupaten dan Kualifikasi Provinsi Sulawesi Barat

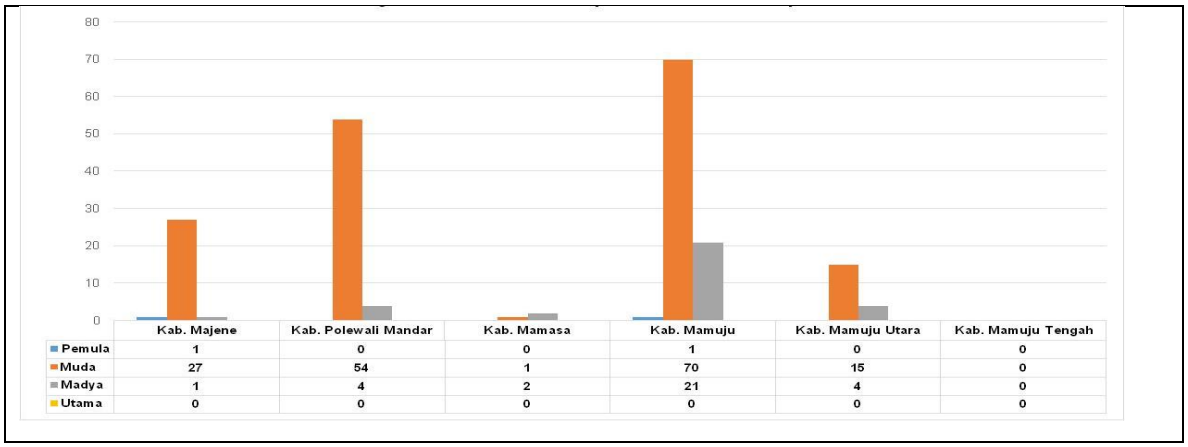

	Kab. Majene	Kab. Polewali Mandar	Kab. Mamasa	Kab. Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Kab. Mamuju Tengah
Pemula	1	0	0	1	0	0
Muda	27	54	1	70	15	0
Madya	1	4	2	21	4	0
Utama	0	0	0	0	0	0

Sumber : http://lpjk.org

6. Pariwisata

Kunjungan tamu hotel domestik dan manca negara selama tahun 2014 mengalami fluktuasi. Kunjungan wisatawan merupakan indikator utama kinerja pariwisata. Secara rata-rata, selama tahun 2014(*) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau persentase kamar hotel berbintang yang dihuni/dipakai tamu adalah 33,29. Dengan rata-rata lama menginap tamu asing adalah 0,83 hari. Disinyalir bulan September dan November 2013 merupakan bulan dimana banyak tamu menginap di hotel berbintang. Hal ini tercermin dari TPK yang terjadi pada bulan tersebut, yakni 43 persen, tertinggi sepanjang tahun 2014. Secara komulatif kunjungan tamu hotel pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013.

Grafik 3.32

Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Nusantara pada Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya

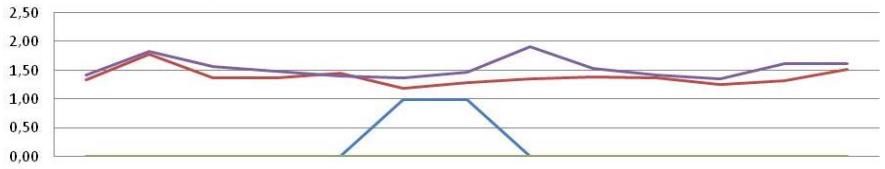

	Des-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	Mei-14	Jun-14	Jul-14	Agust-14	Sep-14	Okt-14	Nop-14	Des-14
HOTEL BERBINTANG ASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL BERBINTANG NUSANTARA	1,34	1,78	1,37	1,37	1,45	1,19	1,29	1,35	1,38	1,37	1,25	1,32	1,52
AKOMODASI LAINNYA ASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKOMODASI LAINNYA NUSANTARA	1,41	1,84	1,56	1,49	1,40	1,36	1,47	1,92	1,53	1,42	1,35	1,61	1,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

7. Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sulawesi Barat terletak di pesisir Sulawesi bagian barat, persis berhadapan langsung dengan Selat Makassar, dengan panjang garis pantai kurang lebih 752 Km. Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi perikanan laut (tangkap) dari berbagai jenis ikan nelayan dan ikan domersal serta ikan-ikan karang juga sangat potensial untuk budidaya perikanan pantai seperti udang, bandeng, taripang dan berbagai jenis komoditas ikan aral. Potensi perikanan air payau cukup besar potensinya dengan ketersediaan lahan seluas 13.584,6 Ha tersebar di Kabupaten Polman, Majene, dan Mamuju belum sepenuhnya tergarap.

Sementara ini, luas lahan yang sudah berproduksi adalah 10.043,2 Ha dengan produksi untuk tahun 2009 adalah bandeng dan udang, 842 ton. Sulawesi Barat juga sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian rumput laut yang sampai dengan saat ini masih terpusat di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju.

Grafik 3.33

Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Jutaan Rupiah) 2013

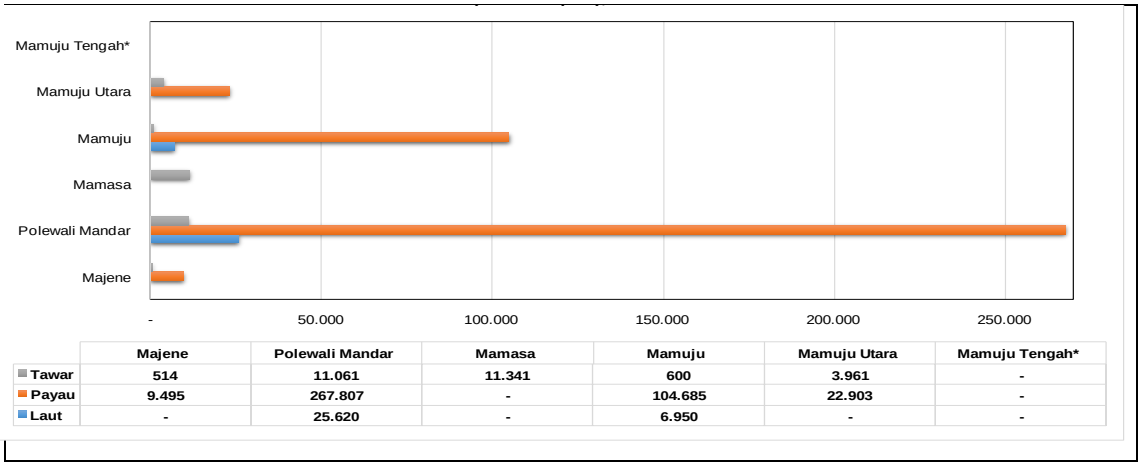

	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Mamuju Utara	Mamuju Tengah*
Tawar	514	11.061	11.341	600	3.961	-
Payau	9.495	267.807	-	104.685	22.903	-
Laut	-	25.620	-	6.950	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulbar

Grafik 3.34

Luas Lahan Perikanan Budidaya (Ha) per Kabupaten di Sulawesi Barat

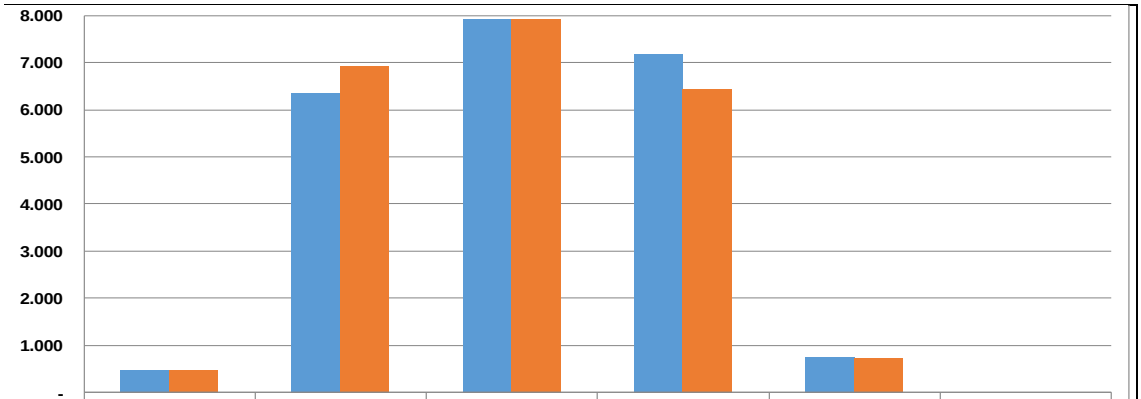

	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Mamuju Utara	Mamuju Tengah*
2012	485	6.350	7.919	7.178	747	-
2013	467	6.919	7.919	6.437	710	-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar

8. Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. SK/726/menhut-II/2012 luas kawasan hutan provinsi Sulawesi Barat seluas 1.107.058Ha, dimana kawasan hutan tersebut terdapat di 9 DAS (daerah aliran sungai).

Dengan luasan kawasan hutan tersebut mendorong investor untuk memanfaatkan pengelolaannya dengan sistem pinjam pakai dimana ada dua perusahan yaitu CV. Bonehau Prima Coal (mengelola 102.56 Ha) dan PT. Tately Budong-budong NV pada areal hutan produksi tetap dengan luas 33,35 Ha.

Grafik 3.35

Luas Kawasan Hutan di Sulawesi Barat

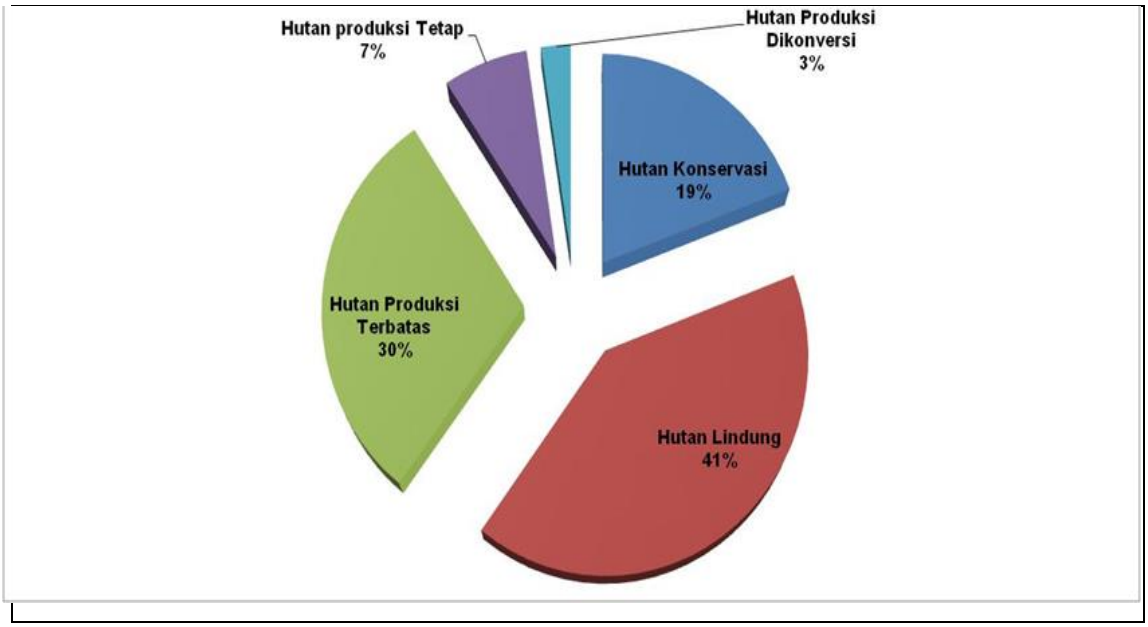

Sumber : Dinas Kehutanan Sulawesi Barat

Dengan potensi hasil hutan umumnya berupa produk kayu dan nun kayu seperti potensi Kayu Hutan Negara (Eboni, Meranti, jati, Palapi, Damar, Kemiri, Rotan, Durian, getah Pinus dan Kayu Campuran lainnya) dan potensi Kayu Hutan Rakyat (Jati Emas, Jabon, Durian, Sengon, Kayu Campuran lainnya)

Tabel 3.36

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat

(SK.726/Menhut-II/2012)

Fungsi Kawasan Hutan	SK. 890/Kpts-II/1999		SK. 890/Kpts-II/1999 Updated		(SK.726/Menhut-II/2012)	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
KSA/KPA	1.283	0,08	822	0,05	214.184	13,23
HL	677.894	40,16	673.567	39,86	452.387	27,95
HPT	361.775	21,43	384.283	22,74	336.061	20,76
HP	65.001	3,85	68.407	4,05	77.345	4,78
HPK	79.735	4,72	50.922	3,01	27.081	1,67
JUMLAH	**1.185.688**	**70,24**	**1.178.001**	**69,71**	**1.107.058**	**68,39**
APL	493.826	29,26	503.105	29,77	503.105	31,08
TUBUH AIR	8.461	0,50	8.521	0,50	8.521	0,50
TOTAL	**1.687.971**	**100,00**	**1.689.627**	**99,98**	**1.618.684**	**99,98**

Sumber : Dinas Kehutanan Sulawesi Barat

9. Peternakan

Pengembangan dan peningkatan usaha peternakan di Propinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari ketersediaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar. Potensi sumber daya alam sangat mendukung kegiatan pengembangan usaha peternakan, misalnya kegiatan budidaya ternak, pengembangan ternak, pengelolaan pasca panen. Tersedianya lahan kering (218.363 Ha), lahan basah (56.038 Ha) dapat dijadikan lahan pengembangan peternakan dan sebagai sumber hijauan makanan ternak.

Tabel 3.37

Produksi Daging Ternak Sulawesi Barat

	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi	Itik	Ayam Ras	Ayam Kampung
Majene	-	135.087	3.583	-	11.714	-	6.271	7.445	67.609
Polewali Mandar	-	1.189.303	13.002	-	195.061	39.014	207.256	1.122.877	2.164.925
Mamasa	-	87.739	86.887	-	1.071	262.188	14.732	6.425	126.277
Mamuju	-	1.328.878	4.147	-	65.072	37.682	32.378	104.033	2.319.543
Mamuju Utara	-	169.868	38.080	-	269	3.172	8.961	437.368	280.388
Mamuju Tengah*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	**-**	**2.910.875**	**145.699**	**-**	**273.187**	**342.056**	**269.598**	**1.678.148**	**4.958.742**

Sumber : Sensus Pertanian Sulawesi Barat 2013

Tabel 3.38

Populasi Ternak Sulawesi Barat

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sapi Potong	90.773	100.295	98.182	124.633	138.201	75.632	79.905	82.058
Sapi Perah	0	4	5	5	5	53	47	44
Kerbau	14.393	14.885	14.920	15.111	15.615	10.411	10.494	7.467
Kambing	254.347	270.993	222.308	231.041	236.932	208.279	216.520	219.755
Kuda	8.714	8.975	8.646	8.866	9.142	6.974	6.996	4.894
Babi	127.804	125.376	152.080	167.422	174.595	115.907	132.475	127.888
Ayam Ras	417.688	128.569	82.195	1.267.084	478.458	867.008	1.019.416	1.850.319
Ayam Kampung	4.609.073	2.108.411	5.223.449	6.535.287	8.240.820	5.278.590	6.557.013	4.599.946
Itik	1.758.508	1.810.184	1.871.332	2.123.103	2.505.996	942.479	956.319	429.981

Sumber : Sensus Pertanian Sulawesi Barat 2013

10. Pertambangan

Dewasa ini Sulawesi Barat tengah berupaya mengembangkan sumber energi alternatif yang bersumber dari nabati yang berbasis peternakan khususnya ternak sapi yang sudah dimulai sejak 2011 lalu hal ini untuk mengantisipasi kelangkang sumber energi fosil yang semakin langka.

Khusus di Kabupaten Mamuju, terdapat banyak potensi tambang, seperti bijih besi, nikel, batu bara, mangan, logam lainnya. Sedangkan potensi bahan galian mineral logam mulia atau emas secara keseluruhan terdapat di empat Kabupaten di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Potensi pertambangan emas yang dimiliki Provinsi Sulbar belum dikelola dengan maksimal atau masih dilakukan penambangan secara tradisional.

Berdasarkan kajian dari Batan (Badan Tenaga Atom Nasional) di provinsi Sulawesi Barat pada deteksi pendahuluan menyimpan potensi Uranium berkisar antara 100-1.500 ppm (part per milion) dan Thorium antara 400-1.800 ppm potensi ini merupakan kandungan tertinggi di Indonesia selain Kalimantan Barat, Papua dan Bangka Belitung.

Provinsi Sulawesi Barat juga menyimpan tambang zeolit sebesar 17.057.600 ton yang ada di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa dan di Desa Seppong Kabupaten Majene, dengan potensi cadangan mencapai 26.400.000 ton, total baru sekitar 70% yang dikelola dimana manfaat zeolit adalah untuk pengisi (filler) pada industri kertas, semen,

beton, kayu lapis, besi baja, dan besi tuang, serta adsorben dalam industri tekstil dan minyak sawit, bahan baku pembuatan keramik.

Sementara kaolin (bahan dasar obat-obatan) terdapat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, dengan potensi sekitar 1.570.937 ton.

Tabel 3.39

Lokasi Pertambangan Menurut kebupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	Mineral	Potensi (Metrik Ton)	Kegiatan
Polewali Mandar			
1. Anreapi	Galene, Bijih Besi	20.756.000	Eksploitasi/Eksplorasi
2. Tapango	Galene, Bijih Besi	25.465.000	Eksploitasi/Eksplorasi
3. Campaligian	Bijih Besi, Emas, Tembaga, Perak	20.563.000	Eksplorasi
Mamasa			
1. Tabulahan	Emas, Tembaga,	30.676.000	Eksplorasi
2. Messawa	Perak, Galene	35.583.000	Eksplorasi
3. Sumarorong	Bijih Besi, Mangan, Galene, Tembaga, Perak	25.825.000	Eksplorasi
Mamuju			
1. Tabulahan	Emas, Tembaga, Perak	35.678.000	Eksploitasi/Eksplorasi
2. Tobadak	Galene, Bijih Besi, Mangan	30.567.230	Eksplorasi
3. Bonehau	Tembaga, Perak, Seng, Emas	50.523.000	Eksploitasi/Eksplorasi
4. Kalumpang	Tembaga, Perak, Bijih Besi, Mangan	54.764.000	Eksplorasi
5. Kalumpang	Perak, Seng, Batubara	20.733.366	Eksplorasi
6. Bonehau	Batubara	5.593.642	Eksploitasi/Eksplorasi
Mamuju Utara			
1. Dapurang	Emas, Tembaga	35.876.476	Eksplorasi
2. Doripoku	Galene, Bijih Besi	30.948.543	Eksplorasi
3. Tikke	Galene, Mangan, Emas Letakan	25.837.546	Eksplorasi

Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 3.40

Blok Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Sulawesi Barat

No.	Nama Blok	Investor	Luas (Km^2)	Lokasi	Tahap Kegiatan
1	Suremana	Exxon Mobile	5.339,63	Mamuju Utara	Eksplorasi
2	Mandar	Exxon Mobile	4.196,25	Majene, Polman	Eksplorasi
3	Pasangkayu	Marathon	4.707,63	Mamuju Utara	Eksplorasi
4	Kuma	Conoco Philips	5.086,10	Mamuju Utara, Mamuju	Eksplorasi
5	Budong- Budong	Tately N.V.	5.494,51	Mamuju Utara, Mamuju	Eksplorasi
6	Karama	Statoil Pertamina	4.287,37	Mamuju Utara	Eksplorasi
7	Karana	Pearl Oil	5.389,68	Majene	Eksplorasi
8	Malunda	PTT E & P	5.000,00	Majene	Eksplorasi
9	Mandar Selatan	PTT E & P	3.800,00	Polman	Eksplorasi

Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

3.1.4 Tantangan Fiskal Regional

a. Proyek MP3EI dan Pembiayaan Infrastruktur di Sulawesi Barat

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan rencana induk pembangunan dari Pemerintah Indonesia untuk mempercepat perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran rakyat. Melalui MP3EI diharapkan mampu mencapai Visi 2025, yaitu menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 - USD 15.500 dan PDB USD 4,0-4,5 triliun.

Dalam implementasinya, Visi 2025 diwujudkan dalam tiga misi utama dan tiga strategi utama.

Misi Utama berfokus pada :

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi;
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik, dan
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran menuju innovation-driven economy.

Strategi Utama dilakukan melalui :

1. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui Koridor Ekonomi,
2. konektivitas nasional, dan
3. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional.

Sementara itu tema Koridor Ekonomi Sulawesi adalah sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional, serta fokus pengembangan kegiatan ekonomi utamanya berupa perikanan, kakao, pertanian pangan, nikel, dan migas.

Pelaksanaan groundbreaking proyek-proyek MP3EI senilai Rp 21 triliun telah dilaksanakan pada bulan Februari 2014.

Proyek-proyek MP3EI tersebut terdiri dari :

1. Mamuju Arteri Road untuk mendukung Pelabuhan Belang-Belang didanai APBN senilai Rp 800 miliar;

2. PLTA Tumbuan Mamuju 450 MW didanai oleh PT. Haji Kalla senilai Rp 17 triliun;
3. PLTU Belang-Belang 2x25 MW didanai oleh PT. Rekind Daya Mamuju senilai Rp 1,5 triliun;
4. Pabrik Minyak Kelapa Sawit didanai PT. Astra Group senilai Rp 1,5 triliun;
5. RSUD Provinsi Sulawesi Barat didanai pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah senilai Rp 238 miliar; dan
6. Dermaga BBM (Depo Pertamina) Belang-Belang didanai PT. Pertamina senilai Rp 170 miliar.

Proyek-proyek tersebut diharapkan membuat konektivitas energi dan logistik di Koridor Ekonomi Sulawesi, khususnya di Wilayah Sulawesi Barat akan semakin berdaya saing dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Sulawesi Barat.

Selain mega proyek di atas, pemerintah juga mengalokasikan dana melalui APBN untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Sulawesi Barat sebesar Rp 902 miliar di tahun 2014. Alokasi tersebut ditujukan antara lain bagi peningkatan dan pelebaran jalan di wilayah Mamuju Tengah dan Utara, penggantian jembatan di Polewali Mandar, Mamuju dan Mamuju Utara, pengendalian banjir di Mamuju, dan pengendalian abrasi pantai di Mamuju Utara, selain bantuan sosial bagi PNPM masyarakat perdesaan.

Tantangan yang mengemuka saat ini, selain keterbatasan dana, adalah menentukan prioritas infrastruktur yang efektif menciptakan daya ungkit pertumbuhan. Secara garis besar implementasi MP3EI di Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

b. Perkembangan Proyek-proyek dalam MP3EI di Sulawesi Barat

No	Proyek	Kondisi Sampai dengan Akhir Tahun 2014
1	Pembangunan PLTA Tumbuan berkapasitas 450 MW di Sungai Karama	**<u>Perkembangan</u>** 1. **AMDAL - Izin Kelayakan Lingkungan** Saat Ini draf surat kelayakan lingkungan masih dalam proses untuk di tanda tangan oleh menteri lingkungan hidup.

Mamuju,

2. **Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung**

   Berdasarkan Plan Layout PLTA Mamuju, diperoleh kurang lebih 181 ha lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTA Mamuju merupakan kawasan hutan lindung. Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung ke menteri Kehutanan telah di ajukan tanggal 1 Agustus 2012, namun masih ada kelengkapan berkas yang masih harus dipenuhi yaitu Izin Kelayakan Lingkungan (AMDAL) yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup.

3. **Pembangunan Jalan Akses**

   Untuk pembangunan jalan akses menuju lokasi PLTA direncanakan akan memakan waktu sekitar 2 tahun (2014-2015). Pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah Pekerjaan jalan dan jembatan yaitu :

   a. Revitalisasi jalan akses untuk ruas salu batu – Kalumpang (55 km) dan
   b. Pembangunan Jalan dan Jembatan akses untuk ruas Kalumpang – Tumbuan (34 km)

4. **Detail Design Enginering**

   a. DED tahap pertama : sementara penyusunan
   b. DED tahap kedua : hampir rampung (75%)

<u>Kendala</u>

1. Penyelesaian AMDAL dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung
2. Kesepakatan harga lahan dengan masyarakat yang belum menemukakn titik temu

<u>Kesimpulan</u>

Perlu Percepatan penyelesaian proses perijinan dan fasilitasi dengan masyarakat**.**

2	Pembangunan PLTU Mamuju berkapasitas 2 x 25 MW	**Perkembangan** Validasi oleh : Dinas ESDM dan PT. PLN Pelaksana : PT. Rekind daya Mamuju Waktu pelaksanaan : 2013 - 2016 Lokasi : Belang-Belang Kab. Mamuju • Pembebasan Lahan 25 Ha (Sertifikat HGB) • Surat Izin Prinsip & Izin Lokasi PLTU Mamuju • Surat Izin Prinsip & Lokasi Pelabuhan Khusus Batubara, • Soil Investigation, Bathymetri dan Topography Lahan PLTU , • Kerangka Acuan & Rekomendasi AMDAL , • Ground Breaking PLTU Mamuju Februari 2014, • EPC Contract Signed , • Perjanjian Pendanaan dengan Perbankan. **Kendala** Banjir yang menggenangi kampung disekitar PLTU **Kesimpulan** Perlu Kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT. Rekind Daya untuk pembuatan saluran buang di Lokasi PLTU.
3	Project Arterial Road to Support Belang-Belang International Port	**Perkembangan** Penghubung Kota Mamuju dengan Bandara Tampa Padang dan Pelabuhan Nusantara Belang-Belang menulusuri Pantai, Pembangunan tahap I Rangas - Kota Mamuju • Pelaksana Kementerian PU(BPJN VI) dan Dinas PU Prov. Sulbar, Lokasi Kab. Mamuju • Pembangunan Tahap pertama dengan anggaran sebesar Rp 100 miliar tahun 2014 • Ground Breaking tanggal 10 Februari 2014, • Tahap Pembangunan Fisik , Penimbunan dan mobilisasi alat (on progress)

		Kendala Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju
4	Pembangunan Depot Minyak BBM Mamuju dan Jetty Pertamina	**Perkembangan** Pelaksana : PT. Pertamina Waktu pelaksanaan : 2014 - 2016 Lokasi : Kab. Mamuju Ground Breaking tanggal 10 Februari 2014, **Kendala** Belum ada kesepakatan antara PT. Pertamina dengan BUMD sebagai pelaksana kegiatan
5	Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Barat Berskala B	**Perkembangan** Pelaksana : Dinas Kesehatan Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014 - 2016 Lokasi : Kab. Mamuju • Feasibility Studi dan Amdal direncanakan dilaksanakan tahun 2014 • Sementara berkoordinasi dengan pihak Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terkait pendanaan Program. • Tahun 2015 bulan Januari telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi sulawesi barat dengan Pusat Investasi Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.239.691.000.000,-
6	Pabrik Pengolahan Minyak Sawit	**Perkembangan** Pelaksan : PT. Tanjung Sarana Lestari / Astra Group Waktu pelaksanaan : 2014 Lokasi : Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Ground Breaking tanggal 10 Februari 2014. Pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan telah rampung sekitar 90 persen. Pabrik ini akan direncanakan mulai operasional pada tahun 2014

7	Peningkatan Fasilitas Bandar Udara Tampa Padang	**Perkembangan** Pelaksana : Diskominfo Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2013 - 2015 Lokasi : Kab. Mamuju • Panjang landasan pacu bandar Udara Tampa Padang 2500 x 45 meter • Telah dilakukan Pengalihan jalan nasional di area Bandara Tampa Padang
8	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Belang -Belang menjadi Pelabuhan Container Internasional.	**Perkembangan** Pelaksana : Diskominfor Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2012 - 2014 Lokasi : Kabupaten Mamuju Rencana pembangunan terminal khusus kontainer tahun 2014: Dermaga : 250 m2, Container yard : 2,5 Ha, Gudang : 3 paket
9	Pembangunan Jalan Provinsi	**Perkembangan** Pelaksana : Dinas PU Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014 Lokasi : Kab. Mamuju Ruas Salubatu-Bonehau-Batas Luwu Utara, Ruas Polewali - Mala'bo, Ruas Salutambung - Urekang – Mambi, Ruas Polewali Tabone sudah mencapai progress 81 persen , Ruas Salutambung-Urekeng-Mambi dengan anggaran 7,1 Milyar sementara tahap pelaksanaan.
10	Penanganan Jalan Majene - Polewali (49.8 Km)	**Perkembangan** Pelaksana : Kemen PU - BBPJN Waktu pelaksanaan : 2011 - 2016 Lokasi : Majene, Polewali Progress Kegiatan sudah mencapai 100 persen, pemeliharaan jalan dilaksanakan tahun 2014
11	Penanganan Ruas Jalan	**Perkembangan** Pelaksana : Kemen PU - BBPJN

	Majene - Tapalang - Mamuju (143,1 Km)	Waktu pelaksanaan : 2014 Lokasi : Kab. Majene, Kab. Mamuju Pelaksanaan Fisik sudah hampir selesai
12	Penanganan Jalan Polewali - Batas Sulsel (23 Km)	**<u>Perkembangan</u>** Pelaksana : Kemen PU - BBPJN Waktu pelaksanaan : 2011 - 2016 Lokasi : Kab. Polewali Pemeliharaan berkala jalan Bts. Sulsel - Bts Kota Polewali (10.471 km) APBN 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 22.897.290.000- Pelebaran Jalan Andi Depu Polewali (3.35 km) APBN 2014 dengan nilai Investasi Rp. 10.456.450.000,-
13	Penanganan Ruas Jalan Strategis Nasional (Salubatu - Mambi - Malabo - Mamasa)	**<u>Perkembangan</u>** Pelaksana : Kemen PU – Dinas PU Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014 - 2016 Lokasi : Kab. Mamasa, Kab. Mamuju • Tahun 2014, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pembangunan poros ini sebesar Rp 44.406.208.049,00, • Lokasi Pekerjaan Km.Salubatu.0+000 s/d 11+600, Pelebaran dan Peningkatan ruas jalan Salubatu – Mamasa dengan panjang target Efektif 11,60 km, Fungsional 14,00 km (Lebar existing perkerasan lama 4,50 M) • Realisasi fisik untuk tahapan ini sebesar 80,46%, Realisasi Keuangan 59,92 %
14	Pengembangan Bandar Udara Sumarorong Mamasa	**<u>Perkembangan</u>** Pelaksana: Kemen Perhubungan & Diskominfo Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2011 - 2015 Lokasi : Kab. Mamasa • Tahun 2014, Perpanjangan Runway menjadi

		1200 x 30 m diperkiran selesai pada akhir tahun 2014 • Pekerjaan Tanah dan Fasilitas Pendukung Lainnya • Tahun 2014 Bandar Udara Sumarorong sudah dioperasikan dengan dimulainya Penerbangan Pesawat CN 212.
15	Pengembangan PPN Palipi	**<u>Perkembangan</u>** Pelaksana : KKP dan DKP Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2011 - 2016 Lokasi : Kab. Majene • Pada tahun 2012 realisasi anggaran untuk konstruksi sebesar 20.487.203.000 dari total anggaran sebesar 21.000.000.000 (APBN). • Tahun 2013 dan 2014 Kementerian Kelautan tidak mengalokasi anggaran untuk PPN Palipi tanpa alasan yang jelas.

Sumber : Bappeda Prov. Sulbar

c. Program MP3EI di Sulawesi Barat yang belum terlaksana

No	Proyek	Kondisi Sampai dengan Akhir Tahun 2014
1	Kawalan manajemen/budidaya usaha tani	Pelaksana : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Kementan Lokasi : Prov. Sulbar (6 Kabupaten)
2	Pengembangan pembibitan/penangkaran benih padi, jagung, kedelai dan ubi kayu	Pelaksana : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Kementan Lokasi : Prov. Sulbar (6 Kabupaten)
3	Pengolahan Kelapa dalam menjadi berbagai produk seperti minyak kelapa, pasta santan, breaker arang, natade coco, dan Meubeler.	Pelaksana : Kemenperindag dan Dinas Perindagkop Prov. Sulbar Lokasi : Kab. Polman, Kab. Majene, Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju
4	Industri Minyak Kasar	Pelaksana : PT. Unggul Widya Teknologi

	(Minyak makan) dari Nabati	Lestari Lokasi : Kab. Mamuju Tengah & Kab. Mamuju Utara
5	Pembangunan SPAM Kota Mamuju 200 L/detik	Pelaksana : Kemen PU Waktu pelaksanaan : 2014 Lokasi : Kab. Mamuju
6	Pembangunan SPAM KPI Palipi 200 L/detik	Pelaksana : Kemen PU Waktu pelaksanaan : 2014 Lokasi : Kab. Majene
7	Pembangunan Rumah Kemasan (Beserta Mesin Kemasan)	Pelaksana : DKP Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014 Lokasi : Kab. Majene, Mamuju dan Mamuju Utara
8	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	Pelaksana : DKP Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014 Lokasi : Kab. Mamasa
9	Pengembangan Budidaya Air Payau	Pelaksana : DKP Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014 - 2015 Lokasi : Kab. Mamasa
10	Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan Asap.	Pelaksana : DKP Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014 - 2015 Lokasi : Kab. Majene
11	Pengolahan Industri Kakao	Pelaksana : Kemenperin, Pertanian, Pemprov dan Pemda Lokasi : Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar
12	Pengolahan Kakao menjadi butter maupun powder	Pelaksana : Kemenperin, Pertanian, Pemprov dan Pemda Lokasi : Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar
13	Pengembangan Industri Pelet Kayu (Wood Pellet)	Pelaksana : Kemenperin, Pertanian, Pemprov dan Pemda Waktu pelaksanaan : 2014 - 2015 Lokasi : Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar

14	Pabrik pengolahan kakao menjadi liquor (Pasta) dan produk makanan dan minuman berbasis coklat lainnya dengan kapasitas pengolahan 1000 kg/hari	Pelaksana : Kemenperin, Pertanian, Pemprov dan Pemda Waktu pelaksanaan : 2014 - 2015 Lokasi : Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Manda
15	Pengembangan kopi Typika 2000 Ha	Pelaksana : Kementrian Pertanian dan Dinas Perkebunan Prov. Sulbar Waktu pelaksanaan : 2014-2015 Lokasi : Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar
16	Normalisasi beberapa muara sungai di Kab. Polewali Mandar dan Kab. Mamuju (Untuk mendukung keberlanjutan dan produktifitas sumber daya ikan endemik di Sulawesi Barat)	Pelaksana : Dinas PU Prov. Sulbar, Kementerian PU (BBWS Pompengan Jeneberang). Waktu pelaksanaan : 2014-2015 Lokasi : Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar

Sumber : Bappeda Prov. Sulbar

d. Permasalahan MP3EI di Sulawesi Barat adalah :
   1. Pembebasan lahan yang memakan waktu cukup lama sehingga proyek MP3EI banyak yang mengalami keterlambatan;
   2. Komitmen Kementerian dalam Pendanaan Kegiatan MP3EI;
   3. Kurangnya Koordinasi antara pihak pelaksana proyek MP3EI di Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sehingga Pemerintah Provinsi tidak memiliki data yang lengkap terkait progress dan realisasi kegiatan.

- Gernas Kakao di Sulawesi Barat

Indonesia merupakan negara penghasil kakao ketiga di dunia dengan produksi yang terus tumbuh 3,5 persen tiap tahunnya. Data tahun 2010 dari Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) menyebutkan,bahwa produsen kakao terbesar adalah :

1. Pantai Gading, dengan produksi sekitar 1,6 juta ton atau 44 % suplai global;
2. Ghana, dengan produksi lebih dari 700 ribu ton atau ± 20 % suplai global;
3. Indonesia, dengan produksi 574 ribu ton atau 16 % suplai global.

Pada 2009, setelah menyadari peranan vital kakao dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia, Pemerintah Indonesia memprakarsai Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Kualitas Kakao (Gernas Kakao). Tujuan Gernas Kakao adalah untuk meningkatkan 460.000 hektare tanaman kakao melalui peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi yang ditopang oleh kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kualitas dan penempatan petugas lapangan untuk membantu petani.

Produksi biji kakao mulai meningkat pada tahun 2014. Karena dampak program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) mulai dirasakan. Hingga saat ini produksi kakao mencapai 712.231 ton yang menempatkan Indonesia sebagai negara produsen terbesar ketiga dunia. Indonesia ditargetkan akan menjadi produsen pengolahan (grinding) kakao terbesar dunia pada 2015 dengan produksi 600 ribu ton kakao per tahun.

Pada bulan November 2011, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Millennium Challenge Corporation (MCC), mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia lewat pertumbuhan ekonomi (Program Compact). Pemerintah Indonesia lantas mendirikan Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia) guna mengelola dan melaksanakan Compact beserta ketiga proyeknya atas nama Pemerintah Indonesia. Compact mulai berjalan mulai tanggal 2 April 2013 hingga tanggal 2 April 2018.

Salah satu dari ketiga proyek Compact adalah Proyek Kemakmuran Hijau yang kegiatan pokoknya adalah Fasilitas Kemakmuran Hijau yang merupakan suatu fasilitas pendanaan yang akan melakukan investasi pada proyek-proyek pengembangan rendah-karbon dalam dua bidang tematik: energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertanian yang lestari.

Dalam rangka Fasilitas Kemakmuran Hijau, MCA-Indonesia mengembangkan perjanjian Kemitraan Kakao Lestari. Dalam rangka mendukung Kemitraan Kakao Lestari, MCA-Indonesia mencanangkan hibah yang berkisar antara US$ 1 juta sampai dengan US$ 10 juta per proyek Kemitraan. Diperkirakan terdapat 1 juta pekebun rakyat yang menanam kakao di atas lahan seluas sekitar

1,8 juta hektare, sehingga kakao merupakan tanaman produksi yang penting di Indonesia serta menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di beberapa provinsi sasaran Proyek Kemakmuran Hijau berikut kabupaten-kabupaten terkaitnya, terutama di Sulawesi.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi penghasil komoditas kakao di tanah air, bahkan diperkirakan 24% dari produksi kakao nasional berasal dari provinsi ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang juga menjadi provinsi sasaran Proyek Kemakmuran Hijau mencanangkan Gerakan Peremajaan Kakao sebagai upaya untuk memulihkan kejayaan kakao Sulawesi Barat. Selain itu, pemangku kepentingan utama lainnya di sektor kakao Indonesia juga telah mengembangkan sejumlah kemitraan public swasta, seperti Cocoa Sustainability Partnership (CSP) dan Kelompok Kerja Kakao di bawah Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro).

Berdasar Data BKPM, potensi kakao di Sulawesi Barat adalah 149.458 ton (2008), 96.860 ton (2009), 101.011 ton (2010), 141.987 ton (2011), 105.032 ton (2012), 101.000 ton (2013) dan 140.000 ton (2014).

Tabel 3.41

Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kakao Sulawesi Barat

No	Nama Daerah	Luas Lahan
1	Kabupaten Majene	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 11.401
2	Kabupaten Mamasa	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 14.893
3	Kabupaten Mamuju	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 68.330
4	Kabupaten Mamuju Utara	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 40.366
5	Kabupaten Polewali Mandar	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 49.275

Sumber : www.kemendagri.go.id dan BKPMD Prov. Sulbar

Hasil penelitian dari tim Universitas Hasanuddin, Makassar, menunjukkan bahwa variabel produksi kakao, harga ekspor kakao, stok kakao tahun sebelumnya dan variabel dummy program Gernas memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya ekspor kakao Sulawesi Barat. Dapat disimpulkan bahwa Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao memberikan kontribusi positif meningkatnya ekspor kakao Sulawesi Barat, terutama pada kegiatan rehabilitasi dengan metode sambung samping karena dapat memberikan hasil produksi yang nyata.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Peran keuangan daerah dalam pembangunan sangat vital. Daerah otonom yang ideal memiliki ciri utama yaitu harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menghasilkan sumber-sumber keuangan sendiri, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mengingat masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga diharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana perimbangan lainnyadapat terus meningkat setiap tahunnya.

Kebijakan umum dalam upaya peningkatan keuangan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2013, dan proyeksi pertumbuhannya di tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel 3.42

Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016

	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Target Tahun 2013	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
4.1	**Pendapatan asli daerah**	**120.434.293.901,04**	**134.984.568.695,00**	**163.935.066.067,73**	**239.795.819.196,00**	**271,766,459,095.50**
4.1.1	Pajak daerah	**96.383.466.901,75**	**94.930.185.805,00**	**120.322.489.850,73**	**216.196.519.196,00**	**243,221,084,095.50**
4.1.2	Retribusi Daerah	**2.041.884.268,00**	**6.855.000.000,00**	**4.529.000.000,00**	**4.141.800.000,00**	**5,177,250,000.00**
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	**0,00**	**0,0**	**1.508.193.327,00**	**1.175.000.000,00**	**1,225,000,000.00**
1.1.3	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	**22.008.924.731,29**	**33.199.382.890,00**	**37.575.382.035,00**	**18.282.500.000,00**	**22,143,125,000.00**

4.2	**Dana Perimbangan**	**512.652.276.902,00**	**663.009.281.065,80**	**769.834.364.069,09**	**992.140.187.000,00**	**1.224,767,173,544.00**
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	**35.212.778.902,00**	**35.542.640.065,80**	**37.319.772.069,09**	**36.113.904.000,00**	**40,989,281,040.00**
4.2.2	Dana alokasi umum	**441.578.798.000,00**	**590.680.361.000,00**	**685.497.592.000,00**	**895.580.933.000,00**	**1.115,172,420,254.00**
4.2.3	Dana alokasi khusus	**35.860.700.000,00**	**36.786.280.000,00**	**47.017.000.000,00**	**60.445.350.000,00**	**68,605,472,250.00**
4.3	**Lain-lain pendapatan yang sah**	**91.907.856.521,00**	**154.014.980.000,00**	156.476.205.000,00	**206.179.500.000,00**	**233,170,768,000.00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	**107.856.521,00**	**435.000.000,00**	**2.896.225.000,00**	**2.276.7000.000,00**	**1,741,090,000.00**
4.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	**91.800.000.000,00**	**153.579.980.000,00**	**153.579.980.000,00**	**203.902.800.000,00**	**231,429,678,000.00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**724.994.473.324,04**	**952.008.829.760,80**	**1.090.245.635.136,82**	**1.438.115.506.196,00**	**1,729,704,400,639.50**

Sumber: Dipenda Provinsi Sulawesi Barat

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Dilakukan Pada Tahun 2016

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pendapatan daerah bersumber dari 3 (tiga) kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah. Upaya meningkatkan penerimaan daerah perlu pula dilakukan dengan investasi, yang dapat menghasilkan dan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, sehingga pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan investasi perlu melakukan perbaikan pelayanan publik, antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan berinvestasi, dan penciptaan sistem insentif sehingga Sulawesi Barat senantiasa menjadi wilayah yang menarik untuk berinvestasi.

Peningkatan peran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dalam mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber perlu dilakukan dan didukung kebijakan. Disamping itu, unit kerja lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD perlu memaksimalkan perannya dalam mendukung peningkatan target penerimaan daerah, sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.43

Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPD Tahun 2016

Provinsi Sulawesi Barat

URAIAN	Proyeksi RPJMD TAHUN 2016	CATATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**271,766,459,095.50**	Kenaikan PAD diasumsikan 13.5 % pertahun
Pajak Daerah	243,221,084,095.50	
Retribusi Daerah	5,177,250,000.00	

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1,225,000,000.00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	22,143,125,000.00	
DANA PERIMBANGAN	**1.224,767,173,544.00**	Kenaikan Dana Perimbangan diasumsikan 13,5% - 24,5% pertahun
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	40,989,281,040.00	
Dana Alokasi Umum	1.115,172,420,254.00	
Dana Alokasi Khusus	68,605,472,250.00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**233,170,768,000.00**	Kenaikan PAD diasumsikan 13.5 % pertahun
Pendapatan Hibah dari Pemerintah (WISAMP 2)	0.00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihak III)	1,741,090,000.00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana BOS)	231,429,678,000.00	
Total Pendapatan	**1,729,704,400,639.50**	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	**59,787,484,327.27**	Proyeksi SILPA diasumsikan tidak lebih

		dari 2,5%
Saldo Kas Neraca Daerah	**10,230,764,380.65**	
Kewajiban Pemda kepada Pihak Ketiga (Penyertaan Modal)	**2,000,000,000.00**	
JUMLAH PROYEKSI PENERIMAAN TAHUN 2016	**1,797,722,649,347.56**	

b. Arah Kebijakan Berkaitan Dengan Target Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan perkiraan pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah khususnya dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi Sulawesi Barat memperhatikan azas perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan pendapatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat meliputi peningkatan pendapatan melalui intensifikasi pengelolaan pendapatan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memberi kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi, upaya tersebut ditempuh dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi target pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target pendapatan daerah Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem OPerasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan yang memperhatikan

Aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, SKPD penghasil Provinsi;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efesiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan motor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan program dan kegiatan serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, yang membagi urusan pemerintahan kedalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016.

Kebijakan belanja saat ini terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang dialokasikan secara langsung guna pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam Belanja Tidak Langsung terdapat komponen anggaran yang dapat dialokasikan untuk secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Juga terdapat komponen belanja untuk dialokasikan membantu Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Sehingga peningkatan alokasi Belanja Tidak Langsung dapat menggambarkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada kebutuhan masyarakat secara nyata, memenuhi ketentuan peraturang perundang-undangan di bidang pendidikan dan kesehatan, dan pencapaian sasaran pembangunan secara langsung. Alokasi anggaran melalui Belanja Tidak langsung dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan pemerintahan.

Untuk Tahun 2016, kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan Belanja Daerah, baik menyangkut Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL), adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
4. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
5. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan

perundangundangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dalam melaksanakan otonomi daerah;

6. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan pemerintah desa.

Sedangkan kebijakan belanja langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat;
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Belanja Daerah diarahkan untuk pencapaian indikator dan target sasaran RPJMD Tahun 2012-2016, dan percepatan pencapaian RAD MDGs, RAD PG, dan RAD GRK;
6. Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;
7. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan diarahkan untuk mencapai 20 (duapuluh) persen secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;

8. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan diarahkan untuk mencapai 10 (duapuluh) persen secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
9. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan Pendidikan Menengah Universal serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
11. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan Daya Saing Daerah, anggaran belanja akan diarahkan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dalam dan UMKM, serta dukungan infrastruktur;
12. Penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
13. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
14. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
15. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
16. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*).

Rencana alokasi Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sesuai dengan arahan kebijakan belanja untuk Tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44

Realisasi dan Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi BaratUntuk Tahun 2011–2015

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2011	Tahun 2012	Target Tahun 2013	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**239.281.335.588,49**	**395.774.452.672,16**	**462.212.074.036,37**	**633.842.788.111,09**	**830.928.051.378,84**
2.1.1	Belanja pegawai	133.839.488.190,88	155.974.247.416,16	208.849.770.707,75	214.403.344.866,04	272.063.390.523,18
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	53.067.500.000,00	169.823.255.256,00	169.484.600.000,00	222.942.800.000,00	341.129.678.000,00
2.1.	Belanja bantuan sosial	10.983.350.000,0	12.826.950.000,0	1.548.084.008,62	11.500.000.000,00	13.358.830.329,18

5		0	0			
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/Kab/kota dan pemdes	35.772.997.397,61	45.000.000.000,00	47.663.135.180,00	86.280.955.758,80	80.499.088.347,64
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada prov/Kab/kotadan pemdes	3618.000.000,00	8.650.000.000,00	32.166.484.140,00	70.749.046.800,00	4.069.012.800,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00
A	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**239.281.335.588,49**	**395.774.452.672,16**	**462.212.074.036,37**	**633.842.788.111,09**	**713.620.000.000,00**
2.2	**Belanja Langsung**	468.529.041.092,45	573.234.377.088,64	681.600.828.608,38	870.583.204.629,22	1.084.102.649.347,56
2.2.1	Belanja pegawai	58.278.317.702,00	78.700.167.308,64	40.275.038.000,00	0,00	0,00
2.2.	Belanja Barang dan jasa	217.487.514.374,	346.006.085.550,	442.443.243.872,	427.173.457.836,4	508.819.402.150,1

2		95	00	38	7	5
2.2.3	Belanja Modal	192.763.209.05,50	148.528.124.230,00	198.882.546.736,00	443.409.746.792,75	575.283.247.197,41
B	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**468.529.041.092,45**	**573.234.377.088,64**	**681.600.828.608,38**	**870.583.204.629,22**	**1.084.102.649.347,56**
C	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**707.810.376.680,94**	**969.008.829.760,80**	**1.143.812.902.644,75**	**1.504.425.992.740,31**	**1.797.722.649.347,56**

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada hakekatnya pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih positif atau surplus anggaran mengakibatkan pemerintah harus memanfaatkan dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja. Pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai penerimaan pembiayaan.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.Penerimaan Pembiayaan, antara lain :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)
2. Pencairan dan cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
5. Penerimaan piutang

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Pembentukan dan cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintahdaerah
3. Pembayaran pokok utang dan
4. Pemberian pinjaman.

Tabel 3.45

Realisasi dan Proyeksi Target Pencapaian Pembiayaan Daerah

Tahun 2010 s/d Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Tahun 2013	Proyeksi Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	**Penerimaan pembiayaan**	**6.000.000.000,-**	17.000.000.000,-	17.000.000.000,-	66.310.486.544,31	11.254.702.574,08
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	**6.000.000.000,-**	19.000.000.000,-	19.000.000.000,-	68.310.486.544,31	13.254.702.574,08
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**6.000.000.000,-**	**19.000.000.000,-**	**19.000.000.000,-**	68.310.486.544,31	13.254.702.574,08
3.**2**	**Pengeluaran pembiayaan**		2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.2.	Penyertaan modal		2.000.000.0	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.0

1	(investasi)pemerintah daerah		00,-	0,-	0,00	00,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,-**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO				**17.000.000.000,-**	0,00	0,00